

SKRIPSI

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH PADA
SEKTOR PENDIDIKAN, TINGKAT PENGANGGURAN
TERBUKA, DAN KEMISKINAN TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI
DI PROVINSI ACEH**



Disusun Oleh:

AMNA NAFISSA
NIM: 210604034

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
2026 M/ 1448**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amna Nafissa
NIM : 210604034
Program Studi : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 April 2026



Amna Nafissa

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

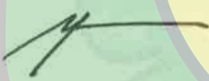
**Pengaruh Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Pendidikan, Tingkat
Pengangguran Terbuka, dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di
Provinsi Aceh**

Disusun Oleh

Amna Nafissa
210604034

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah
memenuhi syarat dalam penyelesaian pada program Studi Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I



Dr. Efendi, M.Si
NIP. 196601081997031001

Pembimbing II



Ibnu Hajar, S.E., M.Sc
NIP. 199706232025051004

Mengetahui,

Ketua Prodi Studi Ilmu Ekonomi



Ismuad, S.E., S.Pd.I., M.Si
NIP. 198601282019031005

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Pendidikan, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh

Amna Nafissa

210604034

Telah disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ilmu Ekonomi

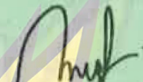
Pada Hari/Tanggal: Selasa, 18 Agustus 2026 M
Safar 1447 H
Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua



Dr. Efendi, M.Si
NIP.196601081997031001

Sekretaris



Ihsan Hajar, S.E., M.Sc
NIP.199706232025051004

Penguji I



Dr. Maimun, SE., Ak., M.Si
NIP.197009171997031002

Penguji II



Mhd. Yavishan Novinda, S.E., M.Si
NIP.200011202025051008

A R - R A N I R Y

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,



y Prof. Dr. Hafas Furgani, M.Ec
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kepelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-3552921, 3551832, Fax. 0651-3552922
Web : www.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Lengkap

Anna Nafissa

NIM

210604034

Fakultas/Jurusan

Ekonomi dan Bisnis Islam/Ilmui Ekonomi

E-mail

annanafissa93@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah.

☐ Tugas Akhir

☐ KKR

☒ Skripsi

Yang berjudul

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Pendidikan, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh

Berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut. UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : Juli 2026

جامعة الرانيري

Mengetahui,
AR - RANIRY

Penulis

Pembimbing I

Pembimbing II

Anna Nafissa

NIM. 210604034

Dr. Efendi, M.Si

NIP. 196601081997031001

Ibnu Hajar, S.E., M.Sc

NIP. 199706232025051004

KATA PENGANTAR

Puji beserta syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas izin, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal tugas akhir yang berjudul **"Pengaruh Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Pendidikan, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh"**. Shalawat serta salam penulis curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Penyusunan proposal tugas akhir ini merupakan salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Strata-I pada Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Ar-Raniry.

Dalam Penyusunan proposal tugas akhir ini penulis mendapatkan banyak bantuan yang bermanfaat dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih terutama kepada Bapak **Dr. Efendi, M.Si** selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak **Ibnu Hajar, S.E., M.Sc** selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyusun proposal tugas akhir ini.

Selanjutnya pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry;

2. Ismuadi., M.Si dan Uliya Azra SE., M.Si selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Hafiih Maulana, S.P., S.HI., M.E selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN AR-Raniry Banda Aceh;
4. Dr. Efendi, M.Si dan Ibnu Hajar, S.E., M.Sc, selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan masukan-masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Jalilah, S.H.I., M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing serta memberikan nasehat dan motivasi terbaik untuk penulis selama menempuh pendidikan di program studi strata satu (S1) Ilmu Ekonomi;
6. Seluruh dosen Prodi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis;
7. Kepada Pak Dr. Maimun, SE.Ak., M.Si selaku dosen Prodi Ilmu Ekonomi berkat kesabaran, perhatian, dan dukungan yang diberikan, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga segala kebaikan dan ilmu yang telah diberikan menjadi amal jariyah dan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT.
8. Dengan penuh rasa syukur dan hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta yang senantiasa memberikan doa,

kasih sayang, dukungan, motivasi, serta pengorbanan yang tiada henti dalam setiap langkah kehidupan penulis. Berkat doa dan dukungan mereka, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, perhatian, dan kerja keras yang telah diberikan oleh kedua orang tua, pencapaian ini tidak akan terwujud. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada mereka atas segala kebaikan yang telah diberikan., penulis yang selalu memberikan semangat dan selalu mendoakan penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini;

9. Kepada adik-adik penulis yang tersayang Lutfi, Alyssa, Munandar, dan Rafasya, yang menjadi sumber semangat dan motivasi terbesar bagi penulis;
10. Terimakasih untuk keluarga besar penulis, baik dari pihak ibu atau ayah atas doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis;
11. Sahabat-sahabat terbaik saya dari jaman SMP yaitu Indah Miftahul Jannah, Viera Dwi Marita, dan Ulya Adelia, yang selalu menjadi tempat berbagi cerita, tawa serta duka, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, bantuan, serta semangat selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kebersamaan, perhatian, dan pengalaman berharga yang telah dibagikan, baik dalam menghadapi kesulitan maupun merayakan setiap pencapaian. Kehadiran kalian menjadi penyemangat bagi penulis untuk terus berusaha hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Semoga persahabatan yang telah terjalin senantiasa terjaga dan membawa kebaikan bagi kita semua.

12. Seluruh mahasiswa Ilmu Ekonomi Angkatan 2021 yang telah memberi motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan studi ini;

13. Terakhir, penulis ingin berterimakasih kepada diri sendiri, Amna Nafissa, yang telah berjuang, bertahan, dan tidak menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan selama proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih untuk segala usaha, kesabaran, kerja keras, dan komitmen untuk terus melangkah meskipun dihadapkan pada berbagai kesulitan. Pencapaian ini merupakan bukti bahwa setiap proses yang dijalani dengan sungguh-sungguh akan membuahkan hasil yang membanggakan. Semoga keberhasilan ini menjadi langkah awal untuk meraih cita-cita dan kesuksesan di masa yang akan datang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa pada penulisan proposal tugas akhir ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan kedepannya. Penulis juga berharap proposal tugas akhir ini dapat memberi informasi yang efektif dan bermanfaat bagi pembaca.

Banda Aceh, 09 Juni 2025

Penulis,

Amna Nafissa

210604034

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	‘	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َـي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َـو	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa* هول : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َـا	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<i>Ā</i>
◌ِـي	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>Ī</i>
◌ُـو	<i>Dammah</i> dan waw	<i>Ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudāh al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طلحة

: *Talḥah*

Catatan:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama : Amna Nafissa
NIM : 210604034
Fakultas/ Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ilmu Ekonomi
Judul : Pengaruh Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Pendidikan, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh
Tebal Skripsi : 87 Halaman
Pembimbing I : Dr. Efendi, M.Si
Pembimbing II : Ibnu Hajar, S.E., M.Sc

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Pengaruh Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Pendidikan, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Metode yang digunakan yaitu metode pendekatan penelitian secara kuantitatif. Data yang digunakan adalah data panel, yaitu data kombinasi data *cross-sectional* dan *time-series* yang memberikan perspektif lebih luas dalam analisis data. Adapun data panel yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) periode tahun 2017-2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh. Tingkat Pengangguran Terbuka tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh, dan Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara simultan, pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.

Kata Kunci : Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi

DAFTAR ISI

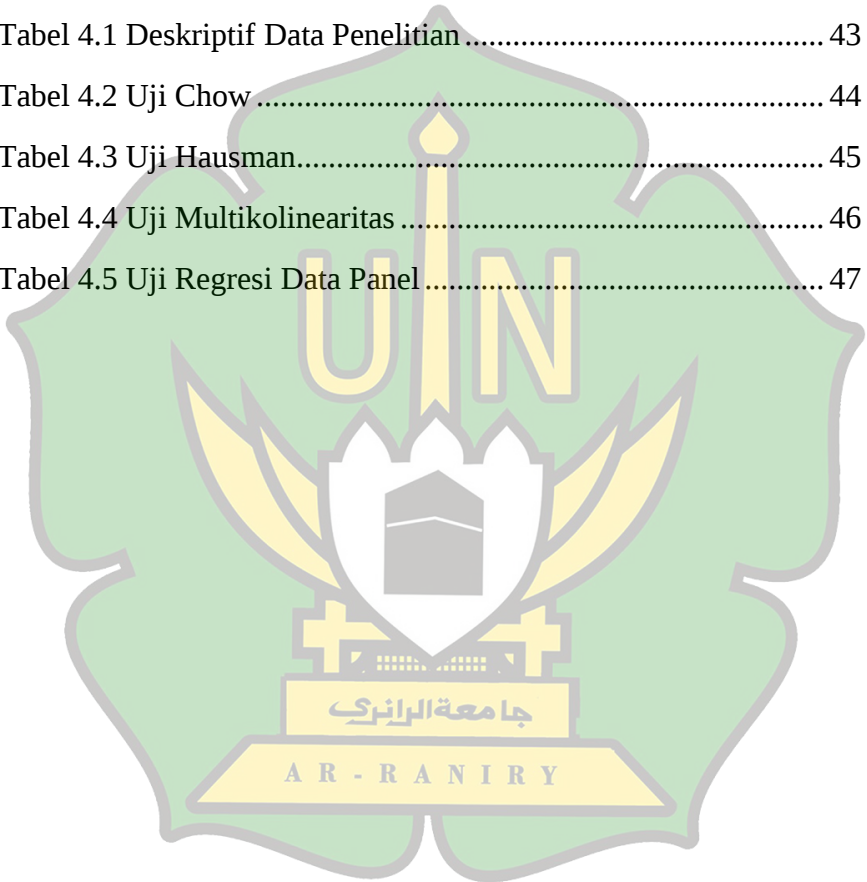
HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI.....	iv
LEMBAR SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	v
LEMBAR PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
 BAB I: PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.5 Sistematika Penulisan.....	13
 BAB II: LANDASAN TEORI	 14
2.1 Pertumbuhan Ekonomi	14
2.1.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi.....	14
2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi	14
2.1.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhahn Ekonomi.....	16
2.1.4 Kebijakan Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi.....	17
2.2 Pengeluaran Pemerintah.....	19
2.2.1 Pengertian Pengeluaran Pemerintah.....	19
2.2.2 Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Pendidika21	
2.3 Pengangguran.....	22
2.3.1 Pengertian Pengangguran.....	22
2.3.2 Jenis-jenis Pengangguran	23
2.3.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi	

Pengangguran.....	24
2.3.4 Akibat Buruknya Pengangguran	25
2.4 Kemiskinan.....	25
2.4.1 Pengertian Kemiskinan.....	25
2.4.2 Faktor Penyebab Kemiskinan.....	26
2.4.3 Indikator Kemiskinan	27
2.4.4 Jenis-jenis Kemiskinan.....	27
2.5 Pengaruh antar Variabel Independen dan Variabel Dependen.....	28
2.5.1 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi... 28	
2.5.2 Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	29
2.5.3 Pengaruh Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi	29
2.6 Penelitian Terkait.....	30
2.7 Kerangka Berpikir	33
2.8 Hipotesis.....	34
BAB III: METODE PENELITIAN	35
3.1 Jenis Penelitian	35
3.2 Jenis dan Sumber Data	35
3.3 Variabel Penelitian	35
3.3.1 Klasifikasi Penelitian.....	35
3.4 Definisi Operasional Variabel.....	35
3.5 Metode Analisis Data	37
3.6 Model Estimasi.....	38
3.7 Uji Signifikasi.....	40
3.7.1 Uji T	40
3.7.2 Uji F	40
3.7.3 Koefisien Determinasi (R^2)	41
3.8 Pemilihan Teknik Estimasi Regresi Data Panel	41
BAB IV: HASIL PENELITIAN.....	43
4.1 Deskriptif Data Penelitian	43
4.2 Pemilihan Model	44
1. Uji Chow	44
2. Uji Hausman.....	45
4.3 Uji Asumsi Klasik	45
1. Uji Multikolinearitas	45
4.4 Analisis Regresi Data Panel	46

4.5 Uji Signifikasi	47
1. Uji T	47
2. Uji F.....	48
3. Koefisien Determinasi.....	48
4.6 Pembahasan	48
1. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.	48
2. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	50
3. Pengaruh Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	51
4. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Pendidikan, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh	52
BAB V: PENUTUP.....	54
5.1 Kesimpulan.....	54
5.2 Saran.....	55
LAMPIRAN.....	57
LAMPIRAN 1 DATA PENELITIAN.....	57
LAMPIRAN 2 OLAH DATA STATA-17	62
1. Summary Statistic	62
2. Common Effect Model.....	62
3. Fixed Effect Model.....	62
4. Random Effect Model	63
LAMPIRAN 3 UJI PANEL STATA-17	63
1. Uji Chow	63
2. Uji Hausman.....	64
LAMPIRAN 4 UJI ASUMSI KLASIK	64
1. Uji Multikolinieritas.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	29
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel	36
Tabel 4.1 Deskriptif Data Penelitian	43
Tabel 4.2 Uji Chow	44
Tabel 4.3 Uji Hausman	45
Tabel 4.4 Uji Multikolinearitas	46
Tabel 4.5 Uji Regresi Data Panel	47



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2017-2024

Dalam (%).....2

Gambar 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh Tahun

2017-2024 Dalam (%).....4

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir33



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai negara berkembang, Indonesia terus mengupayakan menghadirkan berbagai strategi agar posisinya semakin maju. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah melalui pembangunan nasional ialah mendorong laju pertumbuhan ekonomi (Kurniawati & Islami, 2022). Pertumbuhan ekonomi secara konseptual didefinisikan sebagai perubahan berkelanjutan dalam situasi ekonomi suatu negara yang berkembang ke arah positif dalam periode tertentu (Putri & Aimon, 2024). Indikator ini menjadi tolok ukur sejauh mana suatu negara berhasil mencapai kemajuan, sekaligus menggambarkan proses berkelanjutan dalam meningkatkan kondisi ekonomi selama periode tertentu. Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi juga tercermin dalam peningkatan kapasitas produksi suatu perekonomian, yang tercermin melalui kenaikan pendapatan nasional (Putri & Aimon, 2024). Pertumbuhan ekonomi dapat dimaknai sebagai respons atas kenaikan pendapatan per kapita dalam suatu periode tertentu (Ambarwati, Sara, & Aziz, 2021). Bagi Indonesia sebagai negara berkembang, sektor ekonomi

menempati posisi strategis dan merupakan instrumen kunci untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional (Efi, Tiwu & Kiak, 2024).

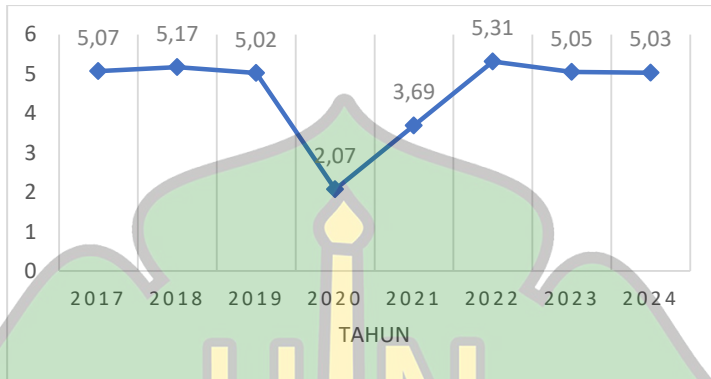
Upaya menuju pertumbuhan ekonomi berkelanjutan jangka panjang sedang berlangsung, meskipun pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan (Handoyo, Erlando & Septiyanto, 2020). Suatu perekonomian dianggap mengalami kemajuan apabila tingkat aktivitas ekonominya melampaui capaian periode sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan merupakan sasaran utama pembangunan nasional di Indonesia. Berbagai faktor turut menentukan laju pertumbuhan tersebut, salah satunya pengeluaran pemerintah yang memiliki peran besar dalam menopang aktivitas ekonomi, mulai dari pembiayaan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai sektor produktif lainnya. Apabila dialokasikan secara tepat sasaran, pengeluaran pemerintah mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperbaiki infrastruktur, serta menciptakan kesempatan kerja baru, sehingga pada gilirannya mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.

Gambar 1.1

Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2017-2024

Dalam (%)



Sumber: BPS, 2024

Selama periode 2017-2024, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia memperlihatkan kecenderungan yang relatif stabil meski diwarnai sejumlah gejolak penting. Pada rentang 2017-2019, pertumbuhan ekonomi berkisar di angka 5 persen, mencerminkan stabilnya kondisi ekonomi nasional sebelum pandemi melanda. Namun, pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan cukup tajam menjadi 2,07% akibat pandemi COVID-19 dan menghambat aktivitas ekonomi. Di tahun 2021 perekonomian mulai menunjukkan pemulihan sebesar 3,69%, kemudian meningkat lagi menjadi 5,31% di tahun 2022, menunjukkan pemulihan yang menyeluruh setelah pandemi.

Selanjutnya, pada 2023 dan 2024, pertumbuhan kembali berada di kisaran 5 persen, menandakan kondisi ekonomi yang cukup solid meskipun belum mencapai laju yang lebih tinggi. Secara umum, capaian selama periode ini menunjukkan ketahanan ekonomi Indonesia dalam menghadapi krisis global, kendati tantangan struktural masih perlu diatasi agar pertumbuhan yang lebih tinggi, berkelanjutan, dan inklusif dapat tercapai.

Secara resmi, Badan Pusat Statistik Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 tercatat sebesar 2,07%. Penurunan ini bahkan lebih buruk daripada prediksi awal pemerintah yang mengharapkan -1,1%. Sepuluh sektor ekonomi mengalami pertumbuhan negatif, di mana sektor transportasi dan pergudangan mengalami penurunan tertinggi sebesar -15,04%, diikuti sektor akomodasi serta makan dan minum dengan -10,22%. Pertumbuhan negatif juga terlihat pada beberapa sektor lain, termasuk industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, pertambangan, administrasi publik, pasokan listrik dan gas, jasa perusahaan, serta jasa lainnya.

Gambaran kinerja berbagai sektor tersebut memperlihatkan luasnya dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian, di

mana hampir seluruh sektor mengalami tekanan berat. Hanya sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang justru diuntungkan karena menjadi fokus utama penanganan pandemi, ditambah sektor informasi dan komunikasi yang berkembang seiring meluasnya pola kerja alternatif seperti work from home selama masa pandemi.

Pertumbuhan ekonomi senantiasa menjadi perhatian utama karena keberadaannya mengindikasikan kenaikan pendapatan per kapita, yang pada gilirannya membuka peluang pembangunan ekonomi di berbagai sektor. Iskandar (2013) mengartikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan signifikan dalam pendapatan suatu negara, yang terlihat dalam peningkatan pendapatan per kapita selama periode tertentu. Disisi lain, Sukirno (2011) menjelaskannya sebagai perkembangan dalam kegiatan ekonomi yang ditandai dengan peningkatan produksi barang dan jasa, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara singkat, pertumbuhan ekonomi dapat dipahami sebagai proses peningkatan output per kapita pada jangka panjang, dengan tiga fokus utama: proses itu sendiri, kenaikan output per kapita, dan dimensi jangka panjangnya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi merupakan proses yang berkelanjutan dan

bukan hanya gambaran ekonomi pada satu waktu tertentu. Peningkatan output per kapita sangat dekat kaitannya dengan dua aspek yang perlu diperhatikan bersamaan: total output Produk Domestik Bruto (PDB) dan jumlah penduduk, karena output per kapita dihitung dengan membagi total output dengan jumlah populasi. Dengan kata lain, analisis pertumbuhan output per kapita memerlukan perhatian pada perkembangan total output dan pertumbuhan populasi secara bersamaan (Reza dan Jihad, 2022).

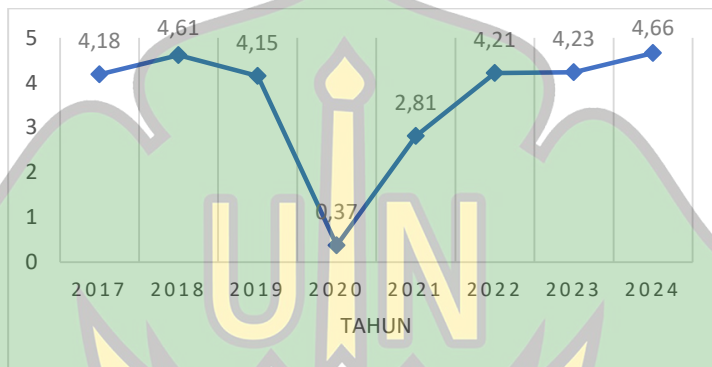
Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP) dinilai sebagai ukuran paling akurat untuk menilai kinerja ekonomi karena mencakup total pendapatan dan pengeluaran nasional suatu negara untuk barang serta jasa. Ukuran ini mewakili kinerja ekonomi karena menunjukkan pendapatan seluruh warga negara. Semakin besar output barang dan jasa, semakin baik perekonomian mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga, bisnis, dan pemerintah (Reza dan Jihad, 2022). Pengeluaran pemerintah merupakan instrumen yang digunakan pemerintah untuk memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan teori ekonomi Keynesian, pengeluaran pemerintah diyakini mampu

mendorong permintaan agregat, membuka lapangan kerja, dan pada akhirnya mendorong output nasional.

Gambar 1.2

Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh Tahun 2017-2024

Dalam (%)



Sumber: BPS, 2024

Antara tahun 2017 dan 2024, pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh menunjukkan dinamika yang sangat bervariasi. Pertumbuhan mencapai 4,18% pada tahun 2017 dan meningkat menjadi 4,61% pada tahun 2018 karena peningkatan kinerja di sektor jasa dan perdagangan, serta peningkatan ekspor. Memasuki 2019, pertumbuhan sedikit melambat menjadi 4,15% akibat menurunnya aktivitas produksi di sejumlah sektor utama dan tingginya ketergantungan pada sektor primer seperti pertanian dan pertambangan. Tahun 2020 menjadi periode tersulit bagi

perekonomian Aceh akibat pandemi COVID-19, yang membuat perekonomian berkontraksi hingga 0,37%, terutama disebabkan menurunnya aktivitas sektor transportasi, pariwisata, dan konsumsi masyarakat.

Memasuki 2021, perekonomian Aceh berangsur pulih dengan capaian pertumbuhan 2,81%, peningkatan tersebut didukung oleh membaiknya konsumsi rumah tangga serta meningkatnya belanja pemerintah. Tren pemulihan ini berlanjut hingga 2022 dengan pertumbuhan 4,21% dan meningkat menjadi 4,23% pada 2023, menandakan perekonomian Aceh yang mulai stabil pascapandemi. Pada 2024, pertumbuhan ekonomi Aceh mencapai puncaknya sebesar 4,66%, capaian tertinggi sepanjang periode tersebut, dengan sektor pertanian, perdagangan, dan pemerintahan sebagai penopang utama, diikuti oleh peningkatan investasi dan ekspor.

Sebagai indikator penting keberhasilan pembangunan daerah, pertumbuhan ekonomi Aceh menunjukkan fluktuasi. Fluktuasi ini dipengaruhi oleh ketergantungan yang kuat pada sektor primer dalam perekonomian, serta tantangan dalam pengelolaan anggaran dan pembangunan yang merata. Data BPS

mencatat pertumbuhan ekonomi Aceh pada 2023 sebesar 4,23% (y-on-y), sedikit lebih tinggi dari 4,21% pada tahun sebelumnya, meski capaian tersebut masih berada di bawah rata-rata nasional. Karakteristik ekonomi Aceh menonjol adalah tingginya ketergantungan pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang memberikan kontribusi lebih dari 30% terhadap PDRB. Sektor migas cenderung menurun, sementara sektor nonmigas—khususnya jasa, perdagangan, dan konstruksi—menjadi penopang utama pertumbuhan. Kendati demikian, kontribusi sektor industri pengolahan yang masih relatif kecil menunjukkan rendahnya tingkat diversifikasi ekonomi Aceh.

Riset yang dilakukan Aswadi dan Mutia (2016) mengungkapkan bahwa ketimpangan pembangunan antarkabupaten di Aceh Utara masih cukup tinggi, kendati pertumbuhan ekonomi secara umum menunjukkan tren positif. Safarida dan Rahmawati (2022) menyatakan bahwa investasi dan tenaga kerja memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi peran pendapatan dasar daerah (PAD) sebagai mediator tidak signifikan. Hasil ini mengisyaratkan bahwa optimalisasi kebijakan fiskal dan tata kelola keuangan daerah belum sepenuhnya berhasil

mempercepat pembangunan ekonomi. Di sisi lain, Murtala (2021) dalam kajiannya terhadap kebijakan fiskal Aceh menyimpulkan bahwa belanja pegawai dan pajak daerah justru cenderung berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, yang menandakan alokasi anggaran belum sepenuhnya diarahkan pada sektor produktif yang mendorong pertumbuhan berkelanjutan.

Sebuah laporan Bank Dunia (2023) mencatat bahwa pengeluaran pemerintah yang dialokasikan pada infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan berkorelasi positif dengan peningkatan output nasional dan produktivitas tenaga kerja. Sebaliknya, pengeluaran yang bersifat konsumtif atau tidak tepat sasaran berpotensi menimbulkan inefisiensi fiskal yang merugikan pertumbuhan ekonomi (World Bank, 2023).

Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang digunakan pemerintah untuk mengatur perekonomian melalui pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara setiap tahun. Pelaksanaan kebijakan tersebut dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tingkat nasional serta Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada tingkat daerah (Jubir dkk., 2023)

Pengeluaran pemerintah bertujuan menjaga kestabilan perekonomian dan pemerataan distribusi pendapatan, sekaligus meningkatkan modal fisik suatu wilayah antara lain infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, sehingga perekonomian tumbuh lebih tinggi dan kesejahteraan masyarakat dapat tercipta. Sebagai instrumen utama kebijakan fiskal, pengeluaran pemerintah berperan mendorong pertumbuhan ekonomi, mempercepat pembangunan, dan mengurangi kesenjangan sosial di suatu wilayah. Di Provinsi Aceh, pengeluaran pemerintah menempati posisi krusial dalam pembiayaan pembangunan, terlebih sejak diberlakukannya status otonomi khusus yang memberi porsi anggaran relatif lebih besar dibandingkan provinsi lain di Indonesia.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, provinsi ini memperoleh dana transfer khusus dari pemerintah pusat, seperti Dana Otonomi Khusus (DOK) dan Dana Bagi Hasil Migas (DBH). Meski demikian, besarnya alokasi pengeluaran pemerintah belum diikuti pencapaian optimal pada pertumbuhan ekonomi maupun indikator pembangunan manusia di Aceh. Data BPS menunjukkan

pertumbuhan ekonomi Aceh pada 2023 hanya sebesar 4,23%, relatif stagnan dibanding tahun sebelumnya, sementara tingkat kemiskinan dan pengangguran di sejumlah kabupaten/kota masih tergolong tinggi.

Pendidikan merupakan sebuah usaha yang dilakukan secara didefinisikan sebagai upaya sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar serta proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Pengembangan tersebut mencakup aspek spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak, dan keterampilan yang diperlukan bagi kehidupan individu maupun masyarakat sebagaimana diatur oleh hukum. Komitmen pemerintah pusat dan daerah terhadap pengembangan sektor ini tercermin dalam sumber daya yang mereka alokasikan (Ananda dkk., 2021).

Pendidikan merupakan salah satu sektor fundamental yang menopang keberhasilan pembangunan, karena berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sumbue daya manusia yang berkualitas selanjutnya menjadi faktor penting dalma mendorong pembangunan ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan di suatu negara. Oleh sebab itu, investasi di bidang

pendidikan menjadi kebutuhan mutlak, sehingga pemerintah perlu membangun sarana dan sistem pendidikan yang mumpuni dengan menjadikan pembangunan pendidikan sebagai prioritas (Ananda, dkk., 2021). Mengacu pada Pasal 31 ayat (1) sampai ayat (4) UUD 1945 tentang pendidikan, ayat (1) menegaskan hak setiap warga negara atas pendidikan; ayat (2) mewajibkan setiap warga negara mengikuti pendidikan dasar dengan biaya yang ditanggung pemerintah; ayat (3) mengamanatkan pemerintah menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia guna mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai undang-undang; serta ayat (4) mewajibkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN maupun APBD demi terselenggaranya pendidikan nasional. Ketentuan pada ayat 1, 2, dan 4 tersebut menegaskan tanggung jawab pemerintah menyelenggarakan pendidikan melalui APBN dan APBD dengan alokasi dana minimal 20%. Ketentuan konstitusional ini membuktikan besarnya tanggung jawab pemerintah atas persoalan pendidikan, mengingat kemajuan bangsa turut menjadi tanggung jawabnya (Carolina, 2022).

Salah satu tujuan pertumbuhan ekonomi adalah membuka lapangan kerja seluas-luasnya sehingga tingkat pengangguran dapat ditekan. Teori ekonomi klasik mengakui korelasi negatif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran, yang dikenal sebagai Hukum Okun (Okun's Law). Artinya, ketika ekonomi tumbuh lebih baik, jumlah pengangguran cenderung menurun. Pengangguran sendiri merujuk pada kondisi seseorang yang berkeinginan dan mampu bekerja namun belum memperoleh pekerjaan yang sesuai kualifikasi dan minatnya dalam kurun waktu tertentu, umumnya diukur per bulan atau per tahun. Tingkat pengangguran suatu negara dihitung berdasarkan persentase pencari kerja aktif terhadap total angkatan kerja. Di Indonesia, sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan tercatat sebagai penyerap tenaga kerja terbesar.

Pengangguran merupakan persoalan kompleks yang berdampak luas, termasuk terhadap kesejahteraan ekonomi baik pada level individu maupun masyarakat secara keseluruhan. BPS mencatat, pada Februari 2021, sekitar 63,17 juta penduduk Indonesia bekerja pada sektor informal. Indonesia juga tercatat sebagai salah satu negara pengirim tenaga kerja migran yang cukup

besar; data Kementerian Luar Negeri menunjukkan sekitar 6,7 juta tenaga kerja migran Indonesia bekerja di berbagai negara pada 2020.

Data BPS per Agustus 2021 mencatatkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia sebesar 7,07%, sedikit menurun dibandingkan bulan sebelumnya. Jumlah penduduk yang menganggur pada periode tersebut mencapai 9,16 juta orang, terdiri atas 6,93 juta pengangguran terbuka dan 2,23 juta pengangguran terselubung. Mengatasi persoalan pengangguran membutuhkan pendekatan yang terintegrasi dan menyeluruh, mencakup berbagai sektor kehidupan serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan sektor swasta.

Kondisi perekonomian suatu wilayah dapat dicermati melalui sejumlah indikator, di antaranya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Pengangguran umumnya dipicu oleh rendahnya penciptaan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang tersedia, sementara kemiskinan bersifat multidimensi karena dipengaruhi oleh beragam kebutuhan dan kondisi yang berbeda pada setiap individu. Tingginya angka kemiskinan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara, karena selain mencerminkan

rendahnya kesejahteraan masyarakat, kondisi tersebut juga membatasi potensi pembangunan ekonomi secara menyeluruh.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan dan Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang tertera maka yang menjadi sebuah rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh?
- 2) Apakah tingkat pengangguran terbuka berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh?
- 3) Apakah kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh?

- 4) Secara simultan apakah pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, tingkat pengangguran terbuka, dan kemiskinan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang dibuat maka secara umum penelitian ini dibuat bertujuan untuk:

- 1) Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh.
- 2) Untuk menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.
- 3) Untuk menganalisis pengaruh kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.
- 4) Untuk menganalisis bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, tingkat pengangguran terbuka, dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi.

1.4. Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan di bidang ekonomi pembangunan, khususnya terkait

peran belanja pemerintah dan pengangguran dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.

2) Manfaat Praktis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah Aceh dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran, terutama terkait alokasi anggaran pendidikan dan penanganan pengangguran demi mendorong pertumbuhan ekonomi.

3) Manfaat Kebijakan

Penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi instansi terkait, seperti Bappeda, Dinas Pendidikan, dan Dinas Ketenagakerjaan Aceh, dalam menyusun program pembangunan yang lebih tepat sasaran.

1.5. Sistematika Penelitian

Sistematika di dalam skripsi ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN Bab ini menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan penelitian

BAB II LANDASAN TEORI Bab ini memuat landasan teori yang menjadi dasar pemikiran dalam penelitian, meliputi kerangka teori, penelitian terdahulu, serta hipotesis yang digunakan sebagai acuan dalam menjawab permasalahan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN Bab ini menjelaskan pendekatan penelitian yang digunakan, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini membahas gambaran umum objek penelitian, menyajikan hasil penelitian, serta menguraikan pembahasan berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan

BAB V PENUTUP Bab ini memuat kesimpulan berdasarkan rumusan masalah, disertai saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak terkait maupun penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pertumbuhan Ekonomi

2.1.1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Hasyim Ali Ibrahim (2016) memaknai pertumbuhan ekonomi sebagai peningkatan berkelanjutan dalam situasi ekonomi suatu negara selama periode tertentu. Ada tiga bagian utama yang menyertai proses pertumbuhan ekonomi, yaitu sebagai berikut:

- a) Teknologi yang maju.
- b) Menggunakan teknologi secara efisien dan intensif.
- c) Persediaan barang yang meningkat secara berkepanjangan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses berkembangnya aktivitas perekonomian yang ditandai dengan meningkatnya jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat. Menurut Asfia Murni (2006), pertumbuhan ekonomi merupakan isu kebijakan ekonomi jangka panjang, dengan istilah tersebut menggambarkan peningkatan atau perkembangan ekonomi suatu negara. Suatu ekonomi dianggap maju ketika produksi barang dan jasa meningkat, yang tercermin pada pendapatan per kapita serta meningkatnya taraf hidup masyarakat.

Soleh (2012) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk memperkuat stabilitas nasional serta menekan angka pengangguran dan kemiskinan, di samping perlu memperhatikan capaian tolok ukur pembangunan lain agar kesejahteraan dapat merata. Pandangan ini selaras dengan teori

Trickle Down Effect, yang mengatakan bahwa kemajuan pada suatu masyarakat atau wilayah dengan sendirinya akan menetes ke bawah, sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi yang merata dengan berfokus pada sektor utama penggerak ekonomi agar hasilnya menyebar ke sektor-sektor lain.

2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Berbagai faktor yang memengaruhi perkembangan ekonomi sebuah negara telah mendorong para ekonom untuk merumuskan berbagai teori pertumbuhan ekonomi, termasuk yang berikut ini:

- 1) Teori pertumbuhan klasik
 - a. Pandangan Adam Smith

Menurut Adam Smith, perkembangan ekonomi berlangsung melalui lima tahapan: berburu, peternakan, pertanian, berdagang, dan industri. Teori ini menjelaskan masyarakat mengalami perubahan dari sistem ekonomi tradisional menuju masyarakat kapitalis modern, di mana pertumbuhan ekonomi meningkat secara terus menerus dengan perkembangan pembagian kerja di antara pelaku ekonomi.

Menurut Adam Smith, sumber daya alam membentuk dasar utama bagi kegiatan produksi dalam suatu perekonomian sekaligus menentukan batas atas pertumbuhan ekonomi. Selama sumber daya tersebut belum dimanfaatkan secara optimal, pertumbuhan ekonomi dapat terus meningkat, dengan ukuran populasi dan stok modal menentukan tingkat produksi sosial dari tahun ke tahun. Namun, jika produksi terus meningkat, sumber daya alam pada

akhirnya akan habis. Tingkat sumber daya yang tersedia ini mewakili batas atas pertumbuhan ekonomi—baik produksi maupun pertumbuhan penduduk akan stagnan setelah batas ini tercapai.

b. Pandangan David Ricardo

Teori Ricardo tidak berbeda secara signifikan dari teori Adam Smith. Perbedaannya terletak pada penggunaan analisis distribusi pendapatan dalam menjelaskan mekanisme pertumbuhan serta penekanan yang lebih besar pada peran sektor pertanian. Ricardo mengidentifikasi beberapa karakteristik ekonomi, yaitu adanya kemajuan teknologi dalam jangka panjang, keterbatasan ketersediaan lahan, dominasi sektor pertanian, perubahan angkatan kerja sesuai dengan tingkat upah alami, dan akumulasi modal, yang terjadi ketika keuntungan pemilik modal melebihi keuntungan minimum.

c. Pandangan Schumpeter

Teori Schumpeter menekankan peran penting para pengusaha sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Pengusaha dipandang sebagai kelompok yang terus mendorong inovasi dalam kegiatan ekonomi, misalnya, melalui peningkatan produksi, perluasan pasar, pengenalan produk baru, inovasi organisasi, dan optimalisasi sumber bahan baku baru.

2) Teori pertumbuhan Neo-Klasik

a. Pandangan J. E. Meade

J. E. Meade, seorang profesor dari Universitas Cambridge, mengembangkan model pertumbuhan ekonomi neoklasik yang menjelaskan mekanisme kerja sistem ekonomi klasik dalam bentuk

yang papling sederhana selama proses pertumbuhan ekonomi (Jhingan M. L., 2012).

b. Pandangan Solow-Swan

Model Solow-Swan memiliki kemiripan dengan model Harrod-Domar dan didasarkan pada empat asumsi utama: tenaga kerja, kecenderungan menabung, alokasi tabungan untuk investasi, dan fungsi produksi untuk setiap periode. Dalam model ini, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh peningkatan faktor produksi, meliputi tenaga kerja, akumulasi modal, dan kemajuan teknologi, sebagaimana diasumsikan dalam analisis ekonomi klasik.

2.1.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

1) Faktor Penawaran (Supply Factors)

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan tolok ukur yang menentukan kuantitas dan kualitas tenaga kerja dan juga memegang peranan penting dalam proses pembangunan, karena kecepatan pembangunan sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia.

b. Sumber Daya Alam (SDA)

Sumber daya alam meliputi sumber daya laut, hasil hutan, mineral, hasil pertambangan, dan kesuburan tanah. Keberadaan sumber daya alam saja tidak cukup untuk menjamin keberhasilan pembangunan; sumber daya alam harus diimbangi dengan

kemampuan sumber daya manusia untuk memanfaatkannya secara optimal.

c. Sumber Daya Modal

Sumber daya modal meliputi akumulasi, tanah, bangunan, material, peralatan, dll., yang memungkinkan orang untuk memanfaatkan sumber daya alam. Ketersediaan modal menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran pembangunan ekonomi karena secara langsung berkontribusi pada peningkatan produktivitas.

d. Kewirausahaan

Kewirausahaan berperan menekan biaya sekaligus meningkatkan produksi, sebab erat kaitannya dengan inovasi yang membantu mengatasi persoalan inefisiensi.

e. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berperan penting dalam mempercepat proses pembangunan, karena sistem tenaga kerja telah bergeser dari tenaga kerja manusia ke produksi mesin. Pergeseran ini memengaruhi efisiensi, kualitas, dan kuantitas produksi dan pada akhirnya mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.

2) Faktor Permintaan (Demand Factors)

Permintaan sangat dipengaruhi oleh kapasitas pasar, tingkat pendapatan, dan preferensi serta kebutuhan konsumen. Perubahan penawaran harus diimbangi oleh perubahan permintaan untuk memberikan insentif yang cukup bagi perekonomian. Jika permintaan lebih rendah daripada penawaran, investasi menurun,

menyebabkan pengangguran, melemahkan kemajuan teknologi, dan pada akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi.

3) Faktor non-ekonomi (Noneconomic Factors)

Para ekonom percaya bahwa budaya suatu negara memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Faktor budaya dapat bertindak sebagai pendorong dan penghambat pembangunan. Budaya yang mendukung pembangunan ditandai dengan ketekunan, kerja cerdas, dan kejujuran, sedangkan budaya yang menghambat pembangunan meliputi pemborosan, anarki, dan korupsi.

2.1.4. Kebijakan Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi

Stabilitas politik dan ekonomi merupakan prasyarat penting untuk pertumbuhan ekonomi yang cepat.

1. Kebijakan Diversifikasi Kegiatan Ekonomi

Negara berkembang umumnya masih bercorak agraris tradisional dengan produktivitas yang rendah, sehingga berdampak pada rendahnya pendapatan per kapita. Karena itu, diperlukan sejumlah langkah untuk memajukan perekonomian negara berkembang, seperti mendorong inovasi guna meningkatkan produktivitas, mengembangkan sektor manufaktur sebagai motor ekonomi baru, serta mengoptimalkan sumber daya alam di sektor utama maupun sektor jasa.

2. Mengembangkan Infrastruktur

Pengembangan infrastruktur harus selaras dengan pembangunan ekonomi, karena semakin maju suatu ekonomi,

semakin besar pula kebutuhan infrastrukturnya. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur harus direncanakan untuk jangka panjang dan disesuaikan dengan kemajuan ekonomi masa lalu dan masa depan.

3. Meningkatkan Tabungan dan Investasi

Rendahnya pendapatan masyarakat berimbas pada rendahnya tingkat tabungan. Padahal, pembangunan membutuhkan tabungan yang besar untuk membiayai investasi, dan rendahnya investasi akan menghambat laju pembangunan ekonomi. Karena itu, mendorong peningkatan tabungan masyarakat sekaligus investasi menjadi syarat penting dalam mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

4. Meningkatkan Taraf Pendidikan Masyarakat

Pendidikan merupakan investasi penting dalam pembangunan ekonomi. Masyarakat dan individu yang melanjutkan pendidikan akan mendapat manfaat dari tingkat pendidikan yang lebih tinggi, karena semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi pula potensi pendapatan.

5. Mengembangkan Institusi yang Mendorong Pembangunan

Pembangunan ekonomi perlu dilakukan secara berkesinambungan dan disertai pengembangan institusi-institusi yang mendukung kegiatan ekonomi. Langkah yang diperlukan antara lain mengalihkan prioritas pemerintah dari sekadar menjalankan administrasi negara menuju institusi yang mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengembangkan

institusi pendukung pembangunan ekonomi, serta memperkuat institusi pendidikan.

6. Merumuskan dan Melaksanakan Perencanaan Ekonomi

Setiap rencana ekonomi harus menetapkan ukuran dan target pertumbuhan yang ingin dicapai. Berbagai aspek harus dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan, termasuk tingkat pertumbuhan target, tingkat tabungan dan investasi yang diinginkan, peran sektor swasta dan negara dalam mencapai tujuan tersebut, perkembangan aktivitas ekonomi di berbagai sektor dan wilayah, serta besaran anggaran dan sumber pendanaan untuk mencapai target pertumbuhan yang telah ditetapkan.

2.2. Pengeluaran Pemerintah

2.2.1. Pengertian Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah instrumen kebijakan fiskal yang digunakan untuk mendorong pertumbuhan investasi dan penciptaan lapangan kerja sambil menjaga stabilitas ekonomi dan pemerataan pendapatan. Dalam teori makro, para ahli memandang perkembangan pengeluaran pemerintah sebagai bagian dari upaya pembangunan, dengan peningkatan pengeluaran yang penting untuk pengurangan kemiskinan. Pengeluaran ini sangat penting untuk pengurangan kemiskinan secara langsung maupun tidak langsung melalui alokasi sumber daya untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sektor lainnya.

Pengeluaran pemerintah bertujuan menjaga kestabilan perekonomian sekaligus pemerataan distribusi pendapatan, serta

meningkatkan modal fisik suatu wilayah seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, sehingga perekonomian tumbuh lebih tinggi dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud (Sukirno, 2011). Persoalan mendasar kemiskinan terletak pada terbatasnya kapasitas penduduk miskin untuk mengakses layanan sesuai kebutuhan hidup mereka, misalnya layanan kesehatan atau pendidikan, sehingga peran pemerintah melalui belanja bagi penduduk miskin menjadi solusi penting untuk menjamin akses terhadap pelayanan umum.

Pengeluaran pemerintah merupakan komponen penting dari pembangunan ekonomi; ketika peran sektor swasta sebagai penggerak pembangunan melemah, negara dapat turun tangan dengan meningkatkan pengeluarannya. Peningkatan pengeluaran pemerintah berpotensi untuk merangsang pembangunan di sektor lain. Pengeluaran ini mencakup semua pengeluaran pemerintah daerah dalam periode tertentu, yang menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, dikategorikan sebagai berikut:

- a. Belanja tidak langsung ialah pengeluaran yang tidak berkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program atau kegiatan pemerintah. Jenis belanja ini meliputi belanja pegawai, seperti gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, serta belanja bunga, hibah, bantuan sosial, bagi hasil kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah desa, bantuan keuangan, serta belanja tidak terduga.
- b. Belanja langsung merupakan pengeluaran yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan

kegiatan pemerintah daerah. Belanja ini mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Pengeluaran pemerintah berfungsi untuk membiayai berbagai sektor publik yang memiliki peran penting. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan diprioritaskan untuk mendorong pengembangan sumber daya manusia yang terampil, sebagaimana tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia. Investasi di kedua sektor ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia sekaligus menekan tingkat kemiskinan (Firmansyah dkk., 2020).

Pengeluaran pemerintah memainkan peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan umum, terutama melalui upaya mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Pentingnya pengeluaran pemerintah terutama pada layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan irigasi untuk meningkatkan kesejahteraan umum tidak dapat disangkal (Iqbal & Mawaddah, 2020). Alokasi anggaran untuk sektor pendidikan dimaksudkan untuk memperluas akses publik terhadap pendidikan berkualitas tinggi dan terjangkau, sehingga meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini meletakkan dasar bagi pembangunan ekonomi yang lebih produktif dan kompetitif, yang pada gilirannya mendukung pembangunan ekonomi yang stabil dan mapan (Iqbal & Mawaddah, 2020).

Layanan publik mencakup semua layanan yang disediakan oleh penyedia layanan publik untuk memenuhi kebutuhan

penduduk sekaligus menerapkan peraturan hukum. Ini berlaku untuk lembaga pemerintah pusat dan daerah. Di sektor pendidikan, bidang ini merupakan prioritas pemerintah. Hal ini mengarah pada peningkatan berkelanjutan baik dalam kuantitas maupun kualitas lembaga pendidikan dan infrastruktur, dengan tujuan mendaftarkan seluruh penduduk usia sekolah di sekolah-sekolah yang ada. Program pendidikan wajib sembilan tahun berkontribusi dalam mengurangi angka buta huruf, memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan, serta meningkatkan sumber daya manusia sebagai modal utama pembangunan. Para cendekiawan telah lama menekankan pentingnya pendidikan, yang dapat diberikan melalui saluran formal maupun informal (Firmansyah dkk., 2020).

2.2.2. Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Pendidikan

Pengeluaran pemerintah berkontribusi pada pembentukan modal dengan didistribusikan ke berbagai sektor, termasuk lembaga dan infrastruktur. Pembentukan modal di sektor ini umumnya dikategorikan sebagai modal biaya sosial (SOC), yang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi karena sektor swasta biasanya enggan menyediakan layanan publik, meskipun investasi swasta menurun tanpa layanan ini (Heri Suparno, 2014).

Pengeluaran pemerintah adalah bagian salah satu instrumen kebijakan fiskal yang digunakan untuk mengelola perekonomian melalui pendapatan dan belanja negara maupun daerah sesuai dengan anggaran negara (APBN) dan anggaran daerah (APBD) (Apriska dkk., 2024). Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan merupakan alokasi dana pembangunan, khususnya dalam

meningkatkan sumber daya manusia melalui penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan.

Mengacu pada Pasal 31 ayat 1 sampai ayat 4 UUD 1945: ayat (1) setiap warga berhak memperoleh pendidikan; ayat (2) mewajibkan setiap warga negara mengikuti pendidikan dasar yang dibiayai oleh negara; ayat (3) mengamanatkan pemerintah untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional yang mendorong iman, ketakwaan, serta karakter mulia untuk meningkatkan perkembangan intelektual bangsa sesuai dengan ketentuan hukum; dan ayat (4) mewajibkan negara untuk mengalokasikan setidaknya 20 persen dari anggaran negara dan daerah untuk pendidikan guna memastikan pelaksanaan sistem pendidikan nasional.

Ayat 1, 2, dan 4 mencerminkan tanggung jawab pemerintah untuk menjamin pendidikan melalui anggaran negara (APBN) dan anggaran daerah (APBD) dengan alokasi minimum 20 persen. Ketentuan konstitusional ini menggarisbawahi tanggung jawab signifikan pemerintah terhadap pendidikan, karena kemajuan bangsa juga berada dalam lingkupnya. Dari uraian ini, dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan mencakup jumlah alokasi anggaran dan pengeluaran pembangunan yang dialokasikan untuk sektor ini, seperti untuk lembaga pendidikan dan infrastruktur, Dana Dukungan Operasional Sekolah (BOS), program pendidikan wajib dua belas tahun, dan program lainnya (Martha Carolina, 2022).

2.3. Pengangguran

2.3.1. Pengertian Pengangguran

Pengangguran merupakan masalah mendasar di sektor ketenagakerjaan dengan konsekuensi serius, karena secara langsung terkait dengan pendapatan. Karena pendapatan merupakan faktor kunci dalam kesejahteraan, pengangguran dapat mengurangi pendapatan dan kesejahteraan sosial secara keseluruhan (Purnawati & Yuniarta, 2022).

Pengangguran merupakan salah satu permasalahan ekonomi yang masih banyak dihadapi oleh negara berkembang, termasuk Indonesia, karena dapat memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Salah satu bentuk pengangguran yang paling sering dijumpai adalah pengangguran terbuka, yaitu kondisi ketika sebagian angkatan kerja belum mencakup individu yang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, bekerja kurang dari dua hari dalam seminggu, atau berupaya memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan kualifikasinya (Septiani dkk., 2025).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran terbuka meliputi penduduk yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak memiliki peluang, serta mereka yang telah memperoleh pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Tingkat pengangguran terbuka dihitung sebagai persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap total angkatan kerja berdasarkan rumus yang ditetapkan oleh BPS.

$$\text{Rumus TPT} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Keterangan :

TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

PP = Jumlah Pengangguran (jiwa)

PAK = Jumlah Angkatan Kerja (jiwa)

2.3.2. Jenis-jenis Pengangguran

Dalam buku Ekonomi Makro (2016) karya Ali Ibrahim Hasyim dijelaskan bahwa pengangguran dapat dikelompokkan menjadi dua kategori besar, yaitu:

a. Pengangguran Berdasarkan Penyebabnya

Berdasarkan penyebabnya, pengangguran dibedakan menjadi tiga jenis, sebagai berikut.

1) Pengangguran Friksional

Suatu perekonomian dapat dianggap sepenuhnya produktif jika tingkat penganggurannya hanya sekitar dua hingga tiga persen dari total angkatan kerja. Ini umumnya disebut sebagai pengangguran friksional atau pengangguran normal. Para pengangguran sebenarnya tidak benar-benar menganggur, melainkan sedang mencari pekerjaan yang lebih sesuai dengan kemampuan atau preferensinya.

2) Pengangguran Struktural

Tidak semua sektor dan bisnis dalam perekonomian tumbuh secara terus menerus; Beberapa sektor mengalami penurunan akibat produk baru, kemajuan teknologi, tingginya biaya

produksi, serta menurunnya kinerja ekspor. Penurunan ini menyebabkan pengurangan aktivitas ekonomi, yang pada gilirannya mengakibatkan PHK dan pengangguran—kondisi ini disebut pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang timbul akibat perubahan struktur perekonomian.

3) Pengangguran Siklikal

Jenis pengangguran ini terjadi akibat fluktuasi siklus bisnis. Ketika permintaan agregat menurun, perusahaan cenderung mengurangi jumlah tenaga kerja atau bahkan menghentikan kegiatan usahanya, sehingga menyebabkan meningkatnya pengangguran siklis.

4) Pengangguran Teknologi

Pengangguran ini terjadi akibat penggunaan mesin yang menggantikan tenaga kerja manusia dalam proses produksi.

b. Pengangguran Berdasarkan Cirinya

1) Pengangguran terbuka

Pengangguran terbuka dapat terjadi akibat melambatnya aktivitas perekonomian, perkembangan teknologi yang mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja, serta menurunnya pembangunan di sektor industri.

2) Pengangguran Tersembunyi

Kelompok tenaga kerja jenis ini tidak bekerja secara maksimal akibat kondisi tertentu, misalnya, usaha kecil dengan kelebihan tenaga kerja, yang menyebabkan operasi yang tidak efisien. Kelebihan tenaga kerja ini disebut sebagai pengangguran tersembunyi.

3) Setengah menganggur

Jenis pekerja ini tidak bekerja secara optimal karena terbatasnya peluang kerja. Umumnya, mereka bekerja kurang dari 35 jam per minggu, sehingga termasuk dalam kategori setengah menganggur.

4) Pengangguran musiman

Jenis pekerja ini menganggur karena pekerjaan mereka hanya tersedia pada waktu-waktu tertentu sesuai musim. Kondisi ini umumnya dialami oleh pekerja di sektor pertanian dan perikanan, yang aktivitas kerjanya meningkat pada musim tanam atau panen, tetapi berkurang di luar periode tersebut.

2.3.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengangguran

- 1) Populasi yang relatif besar tidak diimbangi dengan pasokan pekerjaan yang cukup, artinya tidak semua pekerja dapat diintegrasikan ke dalam pasar tenaga kerja.
- 2) Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan membuat calon tenaga kerja kurang diminati dunia usaha, sebab kondisi tersebut dinilai tidak mampu mendorong produktivitas kerja maupun hasil produksi.
- 3) Kemajuan teknologi yang pesat belum sejalan dengan kemampuan orang untuk menguasai teknologi ini. Oleh karena itu, perusahaan umumnya hanya mempekerjakan pekerja yang mahir dalam teknologi ini, sementara mereka yang tidak mahir akan dikeluarkan dari pasar tenaga kerja.
- 4) Upaya pengusaha untuk terus menghasilkan keuntungan melalui efisiensi biaya, misalnya, melalui langkah-langkah

rasionalisasi, membutuhkan kinerja optimal dari karyawan untuk mencapai tujuan tersebut. Karyawan yang gagal memenuhi tujuan tersebut berisiko dipecat.

2.3.4. Akibat Buruknya Pengangguran

Sejumlah dampak buruk pengangguran dapat dikelompokkan ke dalam dua aspek (Soekirno, 2000), yaitu:

- a. Dampak negatif terhadap Kegiatan Perekonomian
 - 1) Pengangguran menghambat pencapaian tingkat kesejahteraan dan kemakmuran yang diinginkan.
 - 2) Pengangguran mengurangi penerimaan pajak pemerintah.
 - 3) Pengangguran menghambat pertumbuhan ekonomi dan memiliki dua dampak negatif pada sektor swasta: Pertama, penurunan jumlah orang yang bekerja seringkali menyebabkan kelebihan kapasitas mesin perusahaan. Kedua, aktivitas bisnis yang lemah karena keuntungan yang rendah mengurangi minat investasi.
- b. Dampak negatif terhadap Individu dan Masyarakat
 - 1) Pengangguran menyebabkan hilangnya mata pencaharian dan sumber pendapatan.
 - 2) Pengangguran juga membawa risiko mengurangi keterampilan kerja profesional, karena keahlian hanya dapat dipertahankan melalui praktik berkelanjutan.
 - 3) Tingginya tingkat pengangguran berpotensi memicu ketidakstabilan sosial dan politik akibat meningkatnya ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah.

2.4. Kemiskinan

2.4.1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan fenomena nyata yang belum sepenuhnya hilang dari muka bumi dan mungkin tidak akan pernah hilang. Kemiskinan muncul dari perbedaan kemampuan, kesempatan, dan sumber daya individu. Kemiskinan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga mencerminkan keterbatasan dalam memperoleh hak-hak dasar serta perlakuan yang adil untuk menjalani kehidupan yang layak dan bermartabat.

Konstitusi 1945 menegaskan kembali kewajiban negara untuk menyelenggarakan sistem jaminan sosial bagi seluruh warga negara dan memberdayakan kaum yang kurang mampu sesuai dengan martabat manusia. Kemiskinan tidak hanya terbatas pada pendapatan, kepemilikan alat produksi, dan harta benda, tetapi juga mencakup kerentanan suatu populasi terhadap kemiskinan dan keterbatasan akses mereka terhadap proses pengambilan keputusan politik yang memengaruhi kehidupan mereka.

Kemiskinan juga dipengaruhi oleh distribusi sumber daya yang tidak merata, sehingga mempelebar ketimpangan pendapatan karena masyarakat miskin umumnya memiliki akses yang terbatas terhadap sumber daya yang berkualitas. Kualitas modal manusia yang rendah berkontribusi terhadap kemiskinan karena berkorelasi dengan produktivitas yang rendah, begitu pula dengan kesenjangan dalam akses terhadap modal.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2022), kemiskinan adalah kondisi ketika seseorang atau sekelompok penduduk tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun barang-barang lainnya. Kantor Statistik Federal (BPS) mendefinisikan garis kemiskinan sebagai jumlah yang dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan nutrisi sebesar 2.100 kalori per orang per hari, serta kebutuhan nonpangan, seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi dan kebutuhan dasar lainnya.

Berdasarkan uraian ini, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan hambatan signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan, baik di daerah pedesaan maupun perkotaan, karena kesejahteraan seseorang diukur berdasarkan pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan faktor-faktor lainnya.

2.4.2. Faktor Penyebab Kemiskinan

Penyebab kemiskinan dapat dibagi menjadi dua kategori utama: kemiskinan alami dan kemiskinan buatan. Kemiskinan alami timbul dari kurangnya sumber daya dan rendahnya tingkat perkembangan teknologi, sedangkan kemiskinan buatan disebabkan oleh ketidaksetaraan sosial struktural yang mengecualikan beberapa kelompok penduduk dari akses sebagian masyarakat terhadap sumber daya dan fasilitas ekonomi. Perbedaan kualitas sumber daya manusia juga memengaruhi kemiskinan, karena orang-orang dengan sumber daya terbatas, produktivitas rendah, pendapatan rendah, tabungan rendah, dan investasi suboptimal cenderung terperangkap dalam kemiskinan (Nasution & Marliyah, 2023).

Kemiskinan juga dipicu oleh berbagai faktor lain, seperti partisipasi terbatas dalam kehidupan sosial, kesulitan mencari pekerjaan dan mengamankan penghidupan yang stabil, dan hambatan untuk memulai usaha karena keterbatasan fisik atau mental. Lebih lanjut, kondisi seperti disabilitas dan ketergantungan sosial—seperti anak tanpa keluarga, perempuan korban KDRT, janda miskin, serta masyarakat terisolasi dan terabaikan—juga termasuk dalam definisi kemiskinan (Maharani dkk., 2024).

2.4.3. Indikator Kemiskinan

Berdasarkan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia telah menetapkan tiga indikator kemiskinan:

a) **Garis Kemiskinan (GK)**

GK Adalah hasil tambah dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Nonmakanan (GKNM). Penduduk dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

b) **Garis Kemiskinan Makanan (GKM)**

GKM menunjukkan nilai minimum pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan pangan setara 2.100 kilo kalori per kapita per hari, yang dihitung berdasarkan berbagai komoditas kebutuhan pokok.

c) **Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM)**

GKNM merupakan kebutuhan minimum nonpangan, seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan, yang

dihitung berdasarkan kelompok komoditas nonmakanan di wilayah perkotaan maupun perdesaan.

2.4.4. Jenis-jenis Kemiskinan

Terdapat tiga jenis kemiskinan, yaitu:

a) Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut mengacu pada tingkat kemiskinan absolut, biasanya diwakili sebagai garis, titik, atau garis kemiskinan. Konsep ini digunakan untuk mengidentifikasi kriteria pengkategorian individu atau rumah tangga yang tergolong miskin.

b) Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif merupakan kondisi kemiskinan yang terjadi akibat pembangunan yang belum dinikmati merata oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga menimbulkan kesenjangan pendapatan maupun tingkat kesejahteraan. Wilayah yang belum tersentuh secara optimal oleh program pembangunan umumnya tergolong sebagai daerah tertinggal. Selain itu, tingkat kemiskinan di wilayah tersebut juga dipengaruhi oleh ketimpangan dalam distribusi kekayaan.

c) Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural muncul dari ketidakberdayaan suatu kelompok penduduk dalam suatu sistem negara. Ketidakberdayaan ini merugikan mereka yang terkena dampak dan membuat mereka rentan terhadap eksploitasi. Struktur sosial yang ada mencegah mereka untuk

memanfaatkan sumber pendapatan yang tersedia, sehingga menyebabkan kurangnya perumahan, pendidikan, dan kesempatan berkomunikasi yang memadai dengan komunitas mereka.

2.5. Pengaruh antar Variabel Independen dan Variabel Dependen

2.5.1. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pengeluaran pemerintah berkorelasi negatif dengan pertumbuhan ekonomi; pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi bahkan dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi (Fithri, 2017). Fithri (2017) mendefinisikan pengeluaran pemerintah sebagai anggaran yang dialokasikan untuk membiayai berbagai program yang bertujuan untuk stabilisasi harga dan dengan demikian mendorong pertumbuhan ekonomi.

Hasil analisis data dan pengujian hipotesis oleh Diwayana dkk. (2021) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Medan antara tahun 2010 dan 2017, sebagaimana diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia. Temuan ini berbeda dengan penelitian oleh Baeti (2013), Astri dkk. (2013), dan Kahang (2016), yang menemukan pengaruh positif pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Perbedaan ini kemungkinan disebabkan oleh anggaran yang relatif kecil yang dialokasikan untuk sektor pendidikan selama periode pengamatan penelitian tersebut.

2.5.2. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Penelitian oleh Kusumawati dkk. Studi oleh Suryani (2021) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Temuan tersebut sejalan dengan teori Murni (2006) yang menyatakan bahwa peningkatan pengangguran akan menurunkan pertumbuhan ekonomi akibat melemahnya daya beli masyarakat. Selain itu, Darman (2013) menjelaskan bahwa penurunan tingkat pengangguran sebesar 1% berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi hampir 2%. Hasil ini juga konsisten dengan penelitian Novriansyah (2018) dan Kalsum (2017) yang menemukan adanya pengaruh negatif pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi.

Peningkatan tingkat pengangguran dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi karena melemahkan daya beli dan dengan demikian mengurangi permintaan produk (Badan Ketenagakerjaan dan Migrasi Provinsi Jawa Timur, 2019).

2.5.3. Pengaruh Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Studi oleh Suryani (2023) menunjukkan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera Selatan. Selama periode 2019-2021, tingkat kemiskinan di provinsi tersebut mengalami fluktuasi, yaitu sebesar 12,71% pada 2019, menurun menjadi 12,66% pada 2020, kemudian meningkat 12,84% pada 2021.

Penelitian oleh Kusumawati dkk. (2021) menemukan bahwa tingkat kemiskinan memiliki dampak positif dan signifikan

terhadap pertumbuhan ekonomi dari tahun 2008 hingga 2019. Hal ini sejalan dengan temuan Santosa (2016), yang mengidentifikasi korelasi antara meningkatnya kemiskinan dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Todaro (2006) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu mengurangi penyebab kemiskinan, yang dapat menyebabkan munculnya kemiskinan struktural. Dampak positif kemiskinan terhadap perekonomian Jawa Timur dikaitkan dengan fakta bahwa mayoritas penduduk miskin di wilayah tersebut tinggal di komunitas pedesaan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka.

2.6. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian/Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Putri & Aimon (2024) Analisis dampak pengeluaran pemerintah dan likuiditas ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.	Menggunakan metode <i>Ordinary Least Squares</i> (OLS) dengan pendekatan Regresi <i>Data Time Series</i> .	Pengeluaran pemerintah dan likuiditas ekonomi (M2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
2	Kusumawati, dkk (2021) Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap	Metode kuantitatif dalam bentuk sekunder.	Tingkat kemiskinan dan indeks pembangunan manusia menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di

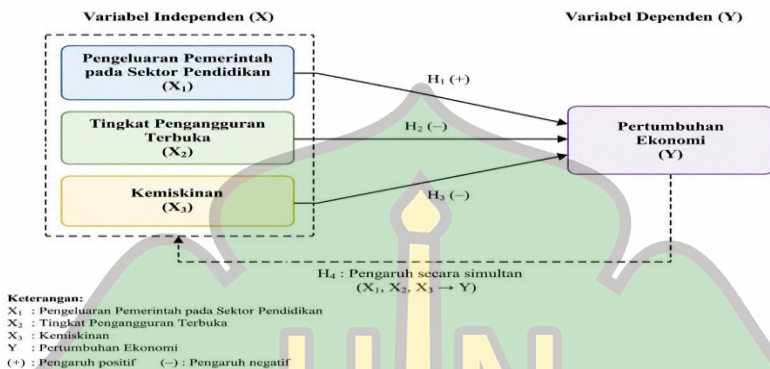
	Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur.		Provinsi Jawa Timur, sedangkan TPT berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
3	Firmansyah, dkk (2020) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sumbawa 2004-2017.	Metode kuantitatif dan <i>Ordinary Least Squares</i> (OLS)	Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.
4	Davina Aslamy Pasha (2023) Efek Pengaruh Pengangguran dan Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.	Metode kualitatif dan kuantitatif menggunakan data sekunder.	Pengangguran dan kemiskinan merupakan hambatan bagi pembangunan suatu negara, oleh karena itu, faktor-faktor yang memengaruhi keduanya harus selalu dipertimbangkan.
5	Adelia Suryani (2023) Pengaruh Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan	Metode penelitian diskriptif dengan data time series.	Kemiskinan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan. Lebih lanjut, kemiskinan memiliki pengaruh negatif

			dan signifikan secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan.
6	Diwayana, dk (2021) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan dan Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Medan	Metode <i>Path Analysis</i> (analisis jalur) dengan data sekunder.	Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, menggunakan analisis jalur, tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Indeks Pembangunan Manusia.
7	Risma, dkk (2024) Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2021	Analisis kuantitatif dengan metode analisis regresi berganda.	Indeks Pembangunan Manusia (PJK) dan kemiskinan secara signifikan memengaruhi pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur, baik secara simultan maupun parsial.
8	Putri, dkk (2024) Pengaruh Tingkat Kemiskinan Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Timur	Metode analisis regresi data panel dengan penelitian kuantitatif deskriptif.	Tingkat Kemiskinan (X_1) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka (Δ_2) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur.

9	Purwanti (2021) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Indonesia	Analisis model <i>Poverty-Equivalent Growth Rate</i> (PEGR) dan analisis regresi linier berganda dengan data time series.	Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif, sedangkan tingkat pengangguran terbuka tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif.
10	Gratsianus (2025) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Mimika	Metode penelitian asosiatif, jenis data kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan tingkat kemiskinan, baik secara parsial maupun simultan, tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mimika.

2.7. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam konsep ini akan disajikan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

2.8. Hipotesis

Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara dari masalah penelitian. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi maka berikut jawaban sementara dalam penelitian ini:

H_{01} = Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Pendidikan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh

H_{a1} = Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh

H_{02} = Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh

H_{a2} = Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh

H_{03} = Kemiskinan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh

H_{a3} = Kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh

H_{04} = Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Pendidikan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Kemiskinan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh.

H_{a4} = Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Pendidikan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, disebut demikian karena data yang digunakan dalam bentuk angka dan dianalisis dengan metode statistik. Penelitian ini disusun untuk menjelaskan hubungan antarvariabel, baik variabel dependen maupun independen.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan merupakan data panel, yaitu kombinasi data cross-sectional dan time-series yang memberikan perspektif lebih luas dalam analisis. Sumber data penelitian berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. Data yang dikumpulkan meliputi pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan kemiskinan. Sampel penelitian terdiri atas data keempat variabel tersebut pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama periode 2017-2024 atau selama delapan tahun pengamatan di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.

3.3. Variabel Penelitian

3.3.1 Klasifikasi Penelitian

Pada penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat). Variabel idnependen terdiri dari pengeluaran pemerintah pada sektor

pendidikan (X_1), TPT (X_2), dan kemiskinan (X_3), sedangkan variabel dependen adalah pertumbuhan ekonomi (Y).

3.4. Definisi Operasional Variabel

Sesuai klasifikasi variabel di atas, berikut disajikan uraian definisi operasional masing-masing variabel:

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Satuan
Pertumbuhan Ekonomi (Y)	Pertumbuhan ekonomi merupakan proses meningkatnya kemampuan suatu wilayah atau negara dalam menghasilkan barang atau jasa selama periode tertentu. Peningkatan tersebut tercermin dari bertambahnya nilai output yang dihasilkan dan umumnya diukur melalui beberapa indikator, seperti kenaikan pendapatan nasional, peningkatan pendapatan per kapita, bertambahnya jumlah tenaga kerja yang terserap dibandingkan dengan jumlah pengangguran serta menurunnya tingkat kemiskinan.	Miliar Rupiah (Rp) Menggunakan log
Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Pendidikan (X_1)	Pengeluaran pemerintah (<i>government expenditure</i>) merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk membiayai penyediaan barang, jasa, serta berbagai	Rupiah (Rp) Menggunakan log

	program yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pengeluaran tersebut mencakup belanja operasional maupun belanja investasi pada sektor pelayanan publik, seperti pendidikan. Selain itu, pengeluaran pemerintah juga dapat berbentuk pembayaran transfer kepada masyarakat yang tidak disertai dengan pertukaran barang atau jasa secara langsung.	
Tingkat Pengangguran Terbuka (X_2)	Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Pengangguran adalah penduduk yang tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, bekerja kurang dari dua hari dalam satu minggu, atau sedang mempersiapkan suatu usaha maupun pekerjaan baru. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan indikator yang persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap total angkatan kerja.	Persen (%)
Kemiskinan (X_3)	Kemiskinan merupakan kondisi ketika seseorang atau rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh rendahnya	Persen (%)

	pendapatan serta terbatasnya akses terhadap pendidikan dan kesempatan kerja.	
--	--	--

Sumber : Data Diolah (2025)

3.5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel, yaitu metode yang menggabungkan data *cross section* dan *time series*. Penggunaan data panel memungkinkan analisis dilakukan terhadap beberapa objek penelitian yang diamati dalam beberapa periode waktu. Model regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\log Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \log X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{it}$$

Keterangan:

- Y = PDRB di Kab/Kota ke-*i* dan ke-*t* (miliar rupiah)
- X₁ = Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Pendidikan (miliar rupiah)
- X₂ = Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
- X₃ = Kemiskinan (%)
- ε = Error term
- t = Tahun
- I = Kabupaten/Kota

3.6. Model Estimasi

Penelitian ini memakai tiga teknik estimasi regresi data panel, yakni Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM).

1. Common Effect Model (CEM)

Pendekatan ini adalah model paling sederhana karena hanya menggabungkan data *time series* dan *cross-sectional* tanpa memperhitungkan karakteristik waktu maupun individu, hingga mengasumsikan seluruh data memiliki perilaku yang seragam pada setiap periode. Model ini diestimasi menggunakan pendekatan kuadrat terkecil (OLS), dengan formulasi Common Effect Model sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_j x_{it}^j + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

Y_{it} : Variabel dependen untuk individu ke- i pada waktu ke- t

X_{it}^j : Variabel independen ke- j untuk individu ke- i pada waktu ke- t

i : Unit *cross section* sebanyak N

t : Unit *time series* sebanyak T

j : Urutan variabel

ϵ_{it} : Komponen *error* untuk individu ke-*i* pada waktu ke-*t*

α : *intercept*

β_j : Parameter untuk variabel ke-*j*

2. Fixed Effect Model (FEM)

Fixed effect model beranggapan bahwa karakteristik antarindividu dapat ditangkap melalui perbedaan intersep, sehingga estimasinya menggunakan teknik variabel dummy yang lazim disebut *Least Squares Dummy Variable* (LSDV). Menurut Silalahi et al. (2014), persamaan Fixed Effect Model dirumuskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_j x_{it}^j + \sum_i^n = 2\alpha_i D_i + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

Y_{it} = Variabel dependen untuk individu ke-*i* pada waktu ke-*t*

X_{it}^j = Variabel independen ke-*j* untuk individu ke-*i* pada waktu ke-*t*

D_i = *dummy variable*

ϵ_{it} = Komponen *error* untuk individu ke-*i* pada waktu ke-*t*

α = *intercept*

β_j = Parameter untuk variabel ke-*j*

3. Random Effect Model (REM)

Random effect model digunakan pada regresi data panel ketika perbedaan antarindividu maupun antarwaktu dianggap tercermin dalam komponen *error*. Model ini mengasumsi bahwa variasi intersep bersifat acak sehingga diestimasi menggunakan metode *Generalized Least Squares* (GLS) dan dikenal juga sebagai *Error Component Model* (ECM). Menurut Silalahi et al. (2014), persamaan random effect model dirumuskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha\beta_j x_{it}^j + \epsilon_{it}; \epsilon_{it} = v_t + w_{it}$$

Keterangan:

u_i = Komponen *error cross section*

V_i = Komponen *error time series*

W_{it} = Komponen *error gabungan*

Asumsi yang digunakan untuk komponen *error* tersebut yaitu:

$$u_i \sim N(0, \sigma_u^2)$$

$$V_t \sim N(0, \sigma_v^2)$$

$$W_{it} \sim N(0, \sigma_w^2)$$

Metode OLS tidak mampu menghasilkan estimator yang efisien untuk REM, sehingga estimasi dilakukan dengan *Generalized Least Square* (GLS) dengan asumsi homoskedastisitas dan tidak adanya korelasi *cross-sectional*.

3.7. Uji Signifikasi

3.7.1. Uji T

Uji parsial dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing koefisien regresi berpengaruh signifikan. Hipotesis pengujian individu ini adalah:

$$H_0 : \beta_i = 0$$

H_0 : secara parsial, variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

H_1 : secara parsial, variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.7.2. Uji F

Uji simultan atau uji F merupakan pengujian hipotesis secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau tidak. Hipotesis pengujian simultan ini adalah:

H_0 : secara simultan, variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

H_1 : secara simultan, variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen,

3.7.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa representatif garis regresi yang terbentuk terhadap data yang diamati, dengan merepresentasikan porsi total variasi yang mampu dijelaskan oleh model. Semakin besar nilainya (mendekati 1), semakin baik pula tingkat kecocokan model tersebut. (R^2)

3.8. Pemilihan Teknik Estimasi Regresi Data Panel

Pemilihan model yang paling sesuai dilakukan melalui sejumlah pengujian pada pengolahan data panel, di antaranya:

1. *Chow Test*

Uji Chow dilakukan untuk menentukan model yang paling sesuai antara CEM dan FEM. Apabila hipotesis nol diterima, CEM menjadi model yang lebih sesuai; sebaliknya, jika hipotesis nol ditolak, FEM menjadi pilihan model terbaik.

$$H_0 = \text{Common Effects Model (CEM)}$$

$$H_1 = \text{Fixed Effects Model (FEM)}$$

Jika nilai probabilitas Chi-square $> 0,05$ maka (H_0 diterima)

Jika nilai probabilitas Chi-square $< 0,05$ maka (H_1 diterima)

2. Hausman Test

Uji Hausman digunakan untuk menentukan model regresi data apaling yang paling sesuai antara FEM dan REM. Apabila hipotesis nol diterima, REM menjadi model yang lebih sesuai; sebaliknya, jika hipotesis nol ditolak, FEM menjadi pilihan model terbaik.

$$H_0 = \text{Random Effect Model (REM)}$$

$$H_1 = \text{Fixed Effects Model (FEM)}$$

Apabila nilai probabilitas Chi-square $> 0,05$ maka (H_0 diterima)

Aabila nilai probabilitas Chi-square $< 0,05$ maka (H_1 diterima)

3. Langrange Multiplier Test

Uji Lagrange Multiplier digunakan untuk menentukan model regresi data panel yang paling sesuai, yaitu antara Random Effect Model (REM) dan Common Effect Model (CEM). Hipotesis ynag digunakan dalam pengujian ini sebagai berikut:

$$H_0 = \text{Common Effects Model (CEM)}$$

$$H_1 = \text{Random Effect Model (REM)}$$

Apabila nilai probabilitas Chi-square $> 0,05$ maka (H_0 diterima)

Apabila nilai probabilitas Chi-square $< 0,05$ maka (H_1 diterima)

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Deskriptif Data Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, data deskriptif penelitian ini dapat dilihat pada berikut:

Tabel 4.1
Deskriptif Data Penelitian

Variabel	Obs	Mean	Std. dev.	Min	Max
Produk Domestik Regional Bruto (Rp)	184	8086.531	5970.09	1272.47	30100.23
Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Pendidikan (Rp)	184	331.000.000.000	116.000.000.000	118.000.000.000	760.000.000.000
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	184	5,784	2,270	1,02	12,52
Kemiskinan (%)	184	15,603	3,294	6,87	22,11

Sumber: Stata 17 (2026)

Tabel 4.1 memperlihatkan hasil analisis deskriptif, di mana variabel Produk Domestik Regional Bruto (Y) selama periode 2017-2024 di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh mencatat nilai terendah sebesar 1272,47 miliar rupiah dan nilai tertinggi 30100,23 miliar rupiah. Nilai tertinggi tercatat di Kabupaten Aceh Utara pada 2024, sementara nilai terendah tercatat di Kota Sabang pada 2017.

Variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (X1) selama periode 2017-2024 di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh memiliki rentang nilai antara Rp118.000.000.000 (terendah) hingga Rp760.000.000.000 (tertinggi). Nilai tertinggi tercatat di Kabupaten Aceh Besar pada 2024, sedangkan nilai terendah tercatat di Kota Sabang pada 2017.

Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (X2) selama periode 2017-2024 di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh berkisar antara 1,02% (terendah) hingga 12,52% (tertinggi). Angka tertinggi tercatat di Kota Lhokseumawe pada 2018, sementara angka terendah tercatat di Kabupaten Bener Meriah pada 2019.

Variabel kemiskinan (X3) selama periode 2017-2024 di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh berkisar antara 6,87% (terendah) hingga 22,11% (tertinggi). Angka tertinggi tercatat di Kabupaten Aceh Singkil pada 2017, sedangkan angka terendah tercatat di Kota Banda Aceh pada 2019.

4.2. Pemilihan Model

1. Uji Chow

Penentuan model regresi data panel melalui uji Chow dilakukan dengan menentukan model terbaik antara common effect model dan fixed effect. Hasil pengujian

menunjukkan nilai $Prob > F$ sebesar 0,000, lebih kecil dari 0,05, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Berdasarkan hasil tersebut, model yang terpilih adalah Fixed Effect Model (FEM), dan karena hasil tersebut, pengujian dilanjutkan dengan uji Hausman.

Tabel 4.2
Uji Chow

<i>Effect test</i>	<i>Prob</i>
F (22.158)	146,89
Prob > F	0.000

Sumber: Hasil Olah Data

2. Uji Hausman

Tabel 4.2
Uji Hausman

<i>Effect Test</i>	<i>Prob</i>
Chi2(3)	7.25
Prob>chi2	0.064

Sumber : Hasil Olah

Uji Hausman digunakan untuk menentukan model regresi data panel yang paling sesuai antara *Fixed Effect Model* dan

Random Effect Model. Hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,064 ($> 0,05$), sehingga H_0 diterima H_1 ditolak. Oleh karena itu, model yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model*(REM).

4.3. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji ada atau tidaknya hubungan linear antarvariabel independen dalam model regresi. Model yang baik semestinya tidak menunjukkan adanya korelasi antarvariabel independen. Kriteria yang digunakan untuk menilai hal ini merujuk pada nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) sebagai berikut:

- a) Jika nilai tolerance $< 0,1$ atau nilai Variance Inflation Factor (VIF) > 10 , maka terjadi multikolinearitas dalam suatu penelitian.
- b) Jika nilai tolerance $> 0,1$ atau nilai Variance Inflation Factor (VIF) < 10 , maka tidak terjadi multikolinearitas.

Hasil dari uji multikolinearitas pada data yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF	1/VIF
Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Pendidikan (Rp)	1.06	0.943
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1.14	0.876
Kemiskinan (%)	1.18	0.846
Mean VIF	1.13	

Sumber: Stata17 (2026)

Berdasarkan tabel 4.3, seluruh variabel memiliki nilai tolerance di atas 0,1 dan nilai Variance Inflation Factor di bawah 10, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas—artinya tidak ditemukan keterkaitan linear yang berarti di antara variabel bebas pada model ini.

4.4. Analisis Regresi Data Panel

Analisis regresi data panel digunakan untuk menguji pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, tingkat pengangguran terbuka, dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh, dengan hasil pengujian disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.5
Uji Regresi Data Panel

Variabel	Coeffesient	Std. err.	t	Prob.
Con	-26.340	2.643	-9.97	0.000
Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Pendidikan (Rp)	1.367	0.095	14.31	0.000
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	0,004	0,006	0,69	0,490
Kemiskinan (%)	-0,073	0,009	-7,87	0,000
Observations	184			
R-squared	0.832			
Number of id	23			

Sumber: Stata17 (2026)

4.5. Uji Signifikasi

1. Uji t

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh parsial masing-masing variabel independen terhadap pertumbuhan ekonomi berdasarkan model random effect sebagaimana ditampilkan pada Tabel 4.5. Hasil estimasi yang diperoleh sebagai berikut:

- a. Koefisien variabel Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Pendidikan menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada tingkat

signifikansi 1%, yang berarti setiap kenaikan 1% pada pengeluaran sektor pendidikan akan mendorong pertumbuhan ekonomi naik sebesar 1,3%, dengan asumsi variabel lain tetap (*ceteris paribus*).

- b. Koefisien variabel Tingkat Pengangguran Terbuka tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga angkanya tidak perlu diinterpretasikan
- c. Koefisien variabel Kemiskinan menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada tingkat signifikansi 1%, yang berarti setiap kenaikan 1% pada tingkat kemiskinan akan menekan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,07%, dengan asumsi variabel lain tetap (*ceteris paribus*).

2. Uji f

Pada model random effect, nilai F-hitung yang diperoleh sebesar 0,000, yang menunjukkan bahwa seluruh variabel independen dalam model secara simultan mampu menjelaskan perubahan pertumbuhan ekonomi (PDRB) di Provinsi Aceh.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai koefisien determinasi sebesar 0,832 menunjukkan bahwa 83,2% variasi pertumbuhan ekonomi (PDRB) di Provinsi Aceh mampu dijelaskan oleh variabel independen dalam model, sedangkan sisanya sebesar 16,8% dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian ini.

4.6. Pembahasan

1. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan merupakan salah satu variabel yang sering dianalisis pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dalam berbagai penelitian. Secara teori, peningkatan belanja di sektor pendidikan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, produktivitas tenaga kerja, serta mendorong inovasi yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi.

Hasil regresi data panel menunjukkan pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan memiliki koefisien sebesar 1,367 dengan nilai probabilitas 0,000, berada di bawah tingkat signifikansi 0,05. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan berpengaruh positif dan

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh, sehingga hipotesis dapat diterima.

Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan anggaran pemerintah pada sektor pendidikan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang tercipta di Provinsi Aceh. Kenaikan belanja pendidikan berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan fasilitas pendidikan, peningkatan mutu tenaga pendidik, pemberian bantuan pendidikan, serta pemerataan akses. Investasi di sektor pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang mampu mendorong produktivitas tenaga kerja sehingga turut berkontribusi terhadap kenaikan output daerah.

Temuan ini mendukung teori Human Capital, yang menjelaskan bahwa pendidikan adalah bentuk investasi dalam pengembangan sumber daya manusia semakin berkualitas sumber daya manusia, semakin tinggi pula produktivitasnya sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan pandangan Sukirno (2011) menyebut pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal untuk mendukung pembangunan ekonomi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, termasuk pendidikan. Oleh sebab itu, pemerintah

Provinsi Aceh diharapkan terus mengoptimalkan pengelolaan anggaran pendidikan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat dan berdampak nyata pada pertumbuhan ekonomi.

2. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil regresi data panel menunjukkan variabel tingkat pengangguran terbuka memiliki nilai probabilitas sebesar 0,490, lebih besar dari 0,05. Temuan tersebut menandakan bahwa tingkat pengangguran terbuka tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh, sehingga hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh tersebut ditolak.

Tidak ditemukannya pengaruh yang signifikan dari tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan bahwa perubahan jumlah pengangguran selama penelitian belum cukup menjelaskan perubahan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Kondisi tersebut mengindikasikan pertumbuhan ekonomi daerah tidak semata dipengaruhi oleh kondisi pasar tenaga kerja, tetapi juga karena faktor lain seperti pengeluaran pemerintah, investasi, konsumsi masyarakat, serta pemanfaatan dana transfer dari pemerintah pusat.

Selain itu, perekonomian Provinsi Aceh yang masih didominasi sektor pertanian, perikanan, dan sektor informal turut menyerap tenaga kerja meski tidak semuanya tercatat sebagai pekerja formal. Kondisi ini menjelaskan mengapa perubahan tingkat pengangguran terbuka tidak berdampak signifikan, baik terhadap kenaikan maupun penurunan pertumbuhan ekonomi. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti penurunan pengangguran, sehingga diperlukan kebijakan yang tidak hanya meningkatkan kualitas tenaga kerja, tetapi juga memperluas kesempatan kerja produktif.

3. Pengaruh Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil analisis regresi data panel menunjukkan bahwa variabel kemiskinan memiliki koefisien sebesar -0,073 dengan nilai probabilitas 0,000 ($< 0,05$). Temuan ini menandakan bahwasanya kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh tersebut dapat diterima.

Koefisien negatif tersebut menunjukkan bahwa peningkatan

tingkat kemiskinan cenderung menekan pertumbuhan ekonomi, sementara penurunan kemiskinan akan mendorong pertumbuhan ekonomi meningkat. Kondisi ini terjadi karena masyarakat miskin memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar, memperoleh akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta menjalankan kegiatan ekonomi produktif, sehingga produktivitas masyarakat menjadi rendah dan berdampak pada menurunnya output perekonomian daerah.

Temuan ini selaras dengan teori ekonomi pembangunan yang menempatkan kemiskinan sebagai salah satu hambatan utama pertumbuhan ekonomi. Tingginya angka kemiskinan dapat menurunkan daya beli masyarakat, membatasi investasi pada sumber daya manusia, serta rendahnya produktivitas tenaga kerja. Karena itu, pemerintah perlu mengoptimalkan program penanggulangan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja, pemberdayaan UMKM, peningkatan kualitas pendidikan, dan perluasan akses layanan kesehatan, guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

4. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Pendidikan, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, tingkat pengangguran terbuka, dan kemiskinan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Temuan ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi provinsi ini dibentuk oleh interaksi berbagai faktor sosial-ekonomi yang saling berkaitan. Peningkatan Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan berperan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, memperluas keterampilan tenaga kerja, serta mendorong inovasi, secara langsung mendorong produktivitas dan kapasitas ekonomi.

Rendahnya tingkat pengangguran terbuka menandakan terserapnya tenaga kerja dalam kegiatan produktif, sehingga mendorong kenaikan output dan konsumsi rumah tangga. Menariknya, variabel kemiskinan justru menunjukkan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, yang diduga tercermin dari alokasi program bantuan sosial, subsidi, dan dukungan ekonomi

lain yang meningkatkan daya beli masyarakat berpendapatan rendah sekaligus mendorong aktivitas ekonomi lokal.

Hasil analisis ini sejalan dengan penelitian Hombing dan Suhariato (2025), bahwa pengeluaran pemerintah yang tepat sasaran, disertai penurunan tingkat pengangguran terbuka dan pengangguran secara keseluruhan, merupakan strategi penting untuk menekan kemiskinan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Sejalan dengan itu, penelitian Sukiran, dkk. (2024) menyebutkan bahwa tingkat kemiskinan menjadi indikator pertumbuhan ekonomi yang perlu mendapat perhatian dan penanganan serius, mengingat kenaikan kemiskinan berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi. Tingkat pengangguran terbuka juga turut memengaruhi pertumbuhan ekonomi, sebab tingginya angka pengangguran dikhawatirkan menekan pertumbuhan lebih jauh akibat banyaknya masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup maupun menghasilkan pendapatan untuk mencapai kesejahteraan.

Berdasarkan uraian dan hasil dari penelitian ini, dapat dipahami bahwasanya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh

bukan semata hasil satu faktor tunggal, melainkan buah interaksi antara kebijakan pemerintah, kondisi pasar tenaga kerja, dan upaya pemberdayaan masyarakat miskin. Oleh sebab itu, strategi pembangunan ekonomi yang efektif perlu memadukan peningkatan kualitas pendidikan, penurunan pengangguran, dan program pengentasan kemiskinan secara bersamaan, sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif di wilayah tersebut.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, tingkat pengangguran terbuka, dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh periode 2017-2024 menggunakan regresi data panel, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan anggaran pendidikan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas tenaga kerja.
2. Tingkat pengangguran terbuka tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Hasil ini menunjukkan bahwa perubahan tingkat pengangguran terbuka selama periode penelitian belum memberikan dampak yang berarti terhadap pertumbuhan ekonomi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti pengeluaran pemerintah, investasi, serta aktivitas pada berbagai sektor ekonomi.

3. Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan tingkat kemiskinan akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan penurunan kemiskinan akan mendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi melalui meningkatnya produktivitas, daya beli, dan kualitas sumber daya manusia.
4. Secara simultan, pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, tingkat pengangguran terbuka, dan kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Temuan ini menegaskan bahwa ketiganya secara bersama-sama mampu menjelaskan perubahan pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan pembangunan yang terintegrasi guna meningkatkan kualitas pendidikan, menekan kemiskinan,

serta memperluas kesempatan kerja demi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

5.2. Saran

Berpijak pada hasil penelitian mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, tingkat pengangguran terbuka, dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh, penulis mengajukan sejumlah saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Provinsi Aceh

Pemerintah Aceh disarankan terus meningkatkan alokasi dan efektivitas pengeluaran di sektor pendidikan, terutama pada program yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, seperti peningkatan mutu tenaga pendidik, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, serta mengembangkan pendidikan vokasi yang selaras dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga investasi pendidikan dapat berdampak bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

2. Dalam Upaya Penanggulangan Pengangguran

Meski tingkat pengangguran terbuka tidak terbukti ada pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

dalam penelitian ini, pemerintah tetap perlu meningkatkan kesempatan kerja melalui upaya peningkatan investasi, pengembangan UMKM, serta penyediaan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, guna meningkatkan kualitas tenaga kerja dan menekan angka pengangguran di Provinsi Aceh.

3. Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan

Pemerintah perlu memperkuat program pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, perluasan akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta pengembangan sektor produktif yang mampu mendorong pendapatan masyarakat, sehingga penurunan kemiskinan dapat meningkatkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti mendatang diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan menambahkan variabel lain yang diduga memengaruhi pertumbuhan ekonomi, seperti investasi, inflasi, Indeks Pembangunan Manusia(IPM), belanja kesehatan, dan Pendapatan Asli Daerah(PAD). Selain itu,

penggunaan metode penelitian yang lebih panjang atau cakupan wilayah yang lebih luas diharapkan dapat menghasilkan temuan yang lebih komprehensif serta memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi.



LAMPIRAN

Lampiran 1: Data Penelitian

Data Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Pendidikan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Kemiskinan, dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh

No	Kab/Kota	Tahun	PSP (Rp)	TPT (%)	KM (%)	PDRB (Rp)
1	Banda Aceh	2017	440,000,000,000	7,75	7,44	16689,22
		2018	442,000,000,000	7,24	7,25	17619,85
		2019	444,000,000,000	6,89	6,87	18569,08
		2020	446,000,000,000	9,54	7,41	18501,63
		2021	448,000,000,000	8,94	7,89	19943,96
		2022	452,000,000,000	8,62	7,53	21560,51
		2023	456,000,000,000	8,03	7,44	23773,42
		2024	460,000,000,000	7,55	7,3	26025,15
2	Langsa	2017	138,000,000,000	7,03	11,56	4538,28
		2018	142,500,000,000	7,12	11,11	4873,14
		2019	155,800,000,000	7,69	10,77	5236,22
		2020	162,300,000,000	9,75	11,04	5274,02
		2021	168,900,000,000	7,21	11,38	5765,49
		2022	175,600,000,000	7,85	10,87	6263,28
		2023	181,200,000,000	7,73	10,8	6853,39
		2024	192,100,000,000	7,34	10,65	7323,86
3	Lhokseumawe	2017	214,693,603,658	10,51	11,41	8070,28
		2018	221,400,000,000	12,51	10,87	8456,72
		2019	238,900,000,000	11,01	10,54	8898,38
		2020	247,500,000,000	11,99	10,86	8867,27
		2021	255,800,000,000	11,16	11,21	9431,39
		2022	263,700,000,000	9,15	10,78	10277,63
		2023	271,200,000,000	8,78	10,74	11169,63
		2024	278,600,000,000	8,47	10,6	11848,24
4	Sabang	2017	117,527,474,951	3,00	18,54	1272,47
		2018	121,300,000,000	4,19	17,79	1397,8

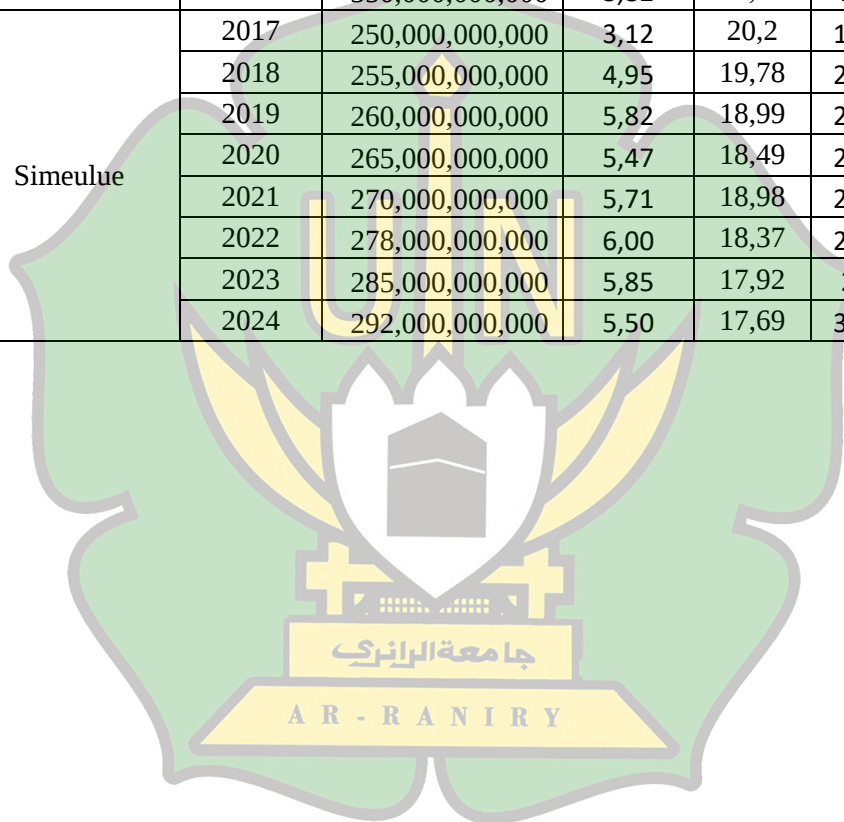
		2019	129,600,000,000	4,60	17,23	1531,59
		2020	135,200,000,000	4,81	17,02	1531,41
		2021	140,900,000,000	3,56	17,45	1601,32
		2022	146,500,000,000	4,01	16,89	1642,78
		2023	152,900,000,000	3,92	16,82	1746,93
		2024	158,300,000,000	2,95	16,6	1861,1
5	Subulussalam	2017	127,016,229,589	4,91	19,36	1535,46
		2018	132,800,000,000	6,44	18,72	1622,89
		2019	140,500,000,000	7,25	18,11	1726,92
		2020	146,300,000,000	6,93	17,91	1803,68
		2021	151,900,000,000	6,26	18,2	2110,95
		2022	159,400,000,000	5,75	17,54	2364,9
		2023	164,800,000,000	5,69	17,47	2559,59
		2024	170,100,000,000	5,12	17,2	2761,85
6	Aceh Barat	2017	300,000,000,000	6,20	20,28	6946,92
		2018	315,000,000,000	8,58	19,31	7692,48
		2019	335,000,000,000	7,41	18,79	7964,35
		2020	345,000,000,000	7,30	18,34	8109,23
		2021	365,000,000,000	7,09	18,81	9983,11
		2022	380,000,000,000	6,09	17,93	12730,16
		2023	395,000,000,000	6,07	17,86	13571,92
		2024	450,000,000,000	5,58	17,6	14050,99
7	Aceh Barat Daya	2017	260,000,000,000	3,16	18,31	3394,32
		2018	270,000,000,000	3,93	17,1	3635,01
		2019	280,000,000,000	4,29	16,26	3854,32
		2020	290,000,000,000	3,93	15,93	3917,42
		2021	305,000,000,000	4,04	16,34	4137,85
		2022	320,000,000,000	4,12	15,44	4546,36
		2023	335,000,000,000	4,08	15,43	4964,87
		2024	360,000,000,000	3,83	15,32	5367,93
8	Aceh Besar	2017	520,000,000,000	8,49	15,41	11638,04
		2018	550,000,000,000	7,29	14,47	12446,12
		2019	580,000,000,000	7,67	13,92	13241,27
		2020	600,000,000,000	7,62	13,84	13329,47
		2021	630,000,000,000	7,70	14,05	14050,48
		2022	660,000,000,000	8,28	13,38	15456,86

		2023	700,000,000,000	8,17	13,38	17067,98
		2024	760,000,000,000	7,93	13,21	18412,05
9	Aceh Jaya	2017	230,000,000,000	6,23	17,12	2275,04
		2018	240,000,000,000	4,91	16,16	2429,23
		2019	250,000,000,000	4,18	15,55	2575,14
		2020	255,000,000,000	4,08	15,4	2625,73
		2021	270,000,000,000	3,47	15,73	2859,09
		2022	285,000,000,000	3,12	14,98	3121,53
		2023	300,000,000,000	2,88	14,9	3373,79
		2024	320,000,000,000	2,75	14,72	3606,65
10	Aceh Selatan	2017	310,000,000,000	7,24	14,07	4855,01
		2018	325,000,000,000	6,03	14,01	5197,23
		2019	340,000,000,000	6,54	13,09	5479,43
		2020	345,000,000,000	6,54	12,87	5530,75
		2021	360,000,000,000	6,46	13,18	5969,85
		2022	380,000,000,000	4,82	12,43	6446,52
		2023	405,000,000,000	4,73	12,1	6963,46
		2024	440,000,000,000	4,56	12,02	7466,23
11	Aceh Singkil	2017	205,000,000,000	7,14	22,11	2126,45
		2018	215,000,000,000	7,96	21,25	2255,19
		2019	225,000,000,000	8,58	20,78	2395,41
		2020	195,000,000,000	8,24	20,2	2422,61
		2021	210,000,000,000	8,36	20,36	2714,4
		2022	220,000,000,000	6,88	19,18	3004,57
		2023	230,000,000,000	6,84	19,15	3202,51
		2024	240,000,000,000	6,44	19,06	3441,04
12	Aceh Tamiang	2017	330,000,000,000	5,43	14,69	6518,27
		2018	335,000,000,000	6,21	14,21	6991,45
		2019	340,000,000,000	6,04	13,38	7385,34
		2020	345,000,000,000	7,97	13,08	7512,69
		2021	350,000,000,000	5,87	13,34	8873,38
		2022	360,000,000,000	7,38	12,61	10433,25
		2023	370,000,000,000	7,21	12,51	10728,75
		2024	380,000,000,000	6,95	12,17	11561,9
13	Aceh Tengah	2017	360,000,000,000	3,91	16,84	6721,94
		2018	365,000,000,000	2,11	15,58	7178,1

		2019	372,000,000,000	2,65	15,5	7472,45
		2020	378,000,000,000	3,05	15,08	7387,37
		2021	385,000,000,000	2,61	15,26	8031,95
		2022	395,000,000,000	4,44	14,5	8873,41
		2023	405,000,000,000	4,42	14,38	9842,5
		2024	415,000,000,000	4,21	14,27	10721,42
14	Aceh Tenggara	2017	300,000,000,000	4,75	14,86	4245,13
		2018	305,000,000,000	3,75	14,29	4558,77
		2019	310,000,000,000	3,45	13,43	4906,92
		2020	315,000,000,000	5,72	13,21	5058,53
		2021	320,000,000,000	6,43	13,41	5421,59
		2022	330,000,000,000	5,09	12,83	5828,69
		2023	340,000,000,000	5,00	12,45	6257,95
		2024	350,000,000,000	4,79	11,99	6737,89
15	Aceh Timur	2017	380,000,000,000	8,42	15,25	9104,76
		2018	385,000,000,000	6,92	14,49	9685,7
		2019	392,000,000,000	7,61	14,47	10280,8
		2020	398,000,000,000	7,26	14,08	10605,78
		2021	405,000,000,000	7,13	14,45	11697,83
		2022	415,000,000,000	8,07	13,91	13101,06
		2023	425,000,000,000	8,03	13,39	13803,09
		2024	435,000,000,000	7,75	13,26	14935,34
16	Aceh Utara	2017	420,000,000,000	11,02	19,78	17502,34
		2018	430,000,000,000	10,14	18,27	18815,38
		2019	440,000,000,000	8,65	17,39	19674,95
		2020	450,000,000,000	8,56	17,02	19702,65
		2021	460,000,000,000	8,31	17,43	23242,91
		2022	475,000,000,000	7,08	16,86	28175,46
		2023	490,000,000,000	7,07	16,64	28377,15
		2024	505,000,000,000	6,88	16,11	30100,23
17	Bener Meriah	2017	260,000,000,000	1,06	18,66	3998,25
		2018	265,000,000,000	1,06	17,74	4202,08
		2019	270,000,000,000	1,03	17,13	4423,11
		2020	275,000,000,000	1,35	16,98	4527,82

		2021	280,000,000,000	1,24	17,26	5006,64
		2022	288,000,000,000	2,61	16,54	5476,17
		2023	295,000,000,000	2,45	16,49	6018,82
		2024	300,000,000,000	2,20	16,2	6520,63
18	Bireuen	2017	400,000,000,000	4,50	15,87	11410,92
		2018	410,000,000,000	3,52	14,31	12092,52
		2019	420,000,000,000	3,83	13,56	12886,85
		2020	430,000,000,000	4,12	13,06	13084,37
		2021	440,000,000,000	4,32	13,25	14079,53
		2022	455,000,000,000	4,20	12,51	15469,56
		2023	470,000,000,000	4,14	12,12	17028,33
		2024	485,000,000,000	3,93	12,1	18380,99
19	Gayo Lues	2017	240,000,000,000	1,71	21,97	2425,65
		2018	245,000,000,000	2,49	20,7	2549,89
		2019	250,000,000,000	1,74	19,87	2608,73
		2020	255,000,000,000	2,01	19,32	2693,27
		2021	260,000,000,000	1,84	19,64	2860,81
		2022	268,000,000,000	2,7	18,87	3076,5
		2023	275,000,000,000	2,65	18,82	3336,16
		2024	282,000,000,000	2,40	18,3	3583,01
20	Nagan Raya	2017	350,000,000,000	4,11	18,44	6571,14
		2018	355,000,000,000	5,91	17,36	6926,11
		2019	362,000,000,000	5,35	16,77	7411,69
		2020	368,000,000,000	5,11	16,59	7656,57
		2021	375,000,000,000	4,99	16,96	9085,9
		2022	385,000,000,000	5,84	16,12	10642,66
		2023	395,000,000,000	5,74	16,07	11871,33
		2024	405,000,000,000	5,22	15,88	12431,71
21	Pidie	2017	420,000,000,000	7,64	21,43	9186,85
		2018	430,000,000,000	7,24	20,47	9894,67
		2019	440,000,000,000	6,83	19,46	10549,23
		2020	450,000,000,000	6,45	19,23	10758,81
		2021	460,000,000,000	7,28	19,59	11341,39
		2022	475,000,000,000	5,94	18,79	12412,37
		2023	490,000,000,000	5,92	18,78	13489,65

		2024	505,000,000,000	5,74	18,59	14549,43
22	Pidie Jaya	2017	300,000,000,000	4,89	19,31	3012,98
		2018	305,000,000,000	5,02	18,72	3240,64
		2019	310,000,000,000	4,34	17,98	3449,87
		2020	315,000,000,000	6,58	17,8	3500,37
		2021	320,000,000,000	3,57	18,12	3680,15
		2022	330,000,000,000	4,40	17,41	3980,18
		2023	340,000,000,000	4,34	17,38	4349,09
		2024	350,000,000,000	3,82	17,21	4724,84
23	Simeulue	2017	250,000,000,000	3,12	20,2	1897,04
		2018	255,000,000,000	4,95	19,78	2042,84
		2019	260,000,000,000	5,82	18,99	2211,89
		2020	265,000,000,000	5,47	18,49	2274,36
		2021	270,000,000,000	5,71	18,98	2460,29
		2022	278,000,000,000	6,00	18,37	2688,03
		2023	285,000,000,000	5,85	17,92	2935,1
		2024	292,000,000,000	5,50	17,69	3150,76



Lampiran 2 : olah data stata-17

Summary Statistic

. sum lpe lpsp TPT KM

Variable	Obs	Mean	Std. dev.	Min	Max
lpe	184	8.729839	.7544831	7.148715	10.31229
lpsp	184	26.45839	.3782365	25.48994	27.35658
TPT	184	5.784293	2.270453	1.02	12.52
KM	184	15.60391	3.29473	6.87	22.11

Common Effect Model

. reg lpe lpsp TPT KM

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	184
Model	85.6252895	3	28.5417632	F(3, 180)	=	277.01
Residual	18.5464927	180	.10303607	Prob > F	=	0.0000
				R-squared	=	0.8220
				Adj R-squared	=	0.8190
Total	104.171782	183	.569244711	Root MSE	=	.32099

lpe	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]	
lpsp	1.437338	.0645709	22.26	0.000	1.309924	1.564751
TPT	.081566	.0111641	7.31	0.000	.0595367	.1035953
KM	-.058735	.0078274	-7.50	0.000	-.0741803	-.0432897
_cons	-28.85511	1.73515	-16.63	0.000	-32.27896	-25.43126

Fixed Effect Model

. xtreg lpe lpsp TPT KM, fe

Fixed-effects (within) regression
Group variable: id

Number of obs = 184
Number of groups = 23

R-squared:

Within = 0.8327
Between = 0.7664
Overall = 0.7694

Obs per group:

min = 8
avg = 8.0
max = 8

corr(u_i, Xb) = 0.1491

F(3,158) = 262.08
Prob > F = 0.0000

lpe	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]	
lpsp	1.324764	.1116614	11.86	0.000	1.104223	1.545306
TPT	.0004724	.0069604	0.07	0.946	-.0132751	.0142198
KM	-.075319	.0106157	-7.10	0.000	-.096286	-.0543519
_cons	-25.14876	3.092389	-8.13	0.000	-31.25652	-19.04101
sigma_u	.36686317					
sigma_e	.07397073					
rho	.96093346	(fraction of variance due to u_i)				

F test that all u_i=0: F(22, 158) = 146.89

Prob > F = 0.0000

Random Effect Model

. xtreg lpe lpsp TPT KM, re

Random-effects GLS regression
Group variable: id

Number of obs = 184
Number of groups = 23

R-squared:

Within = 0.8323
Between = 0.7727
Overall = 0.7754

Obs per group:

min = 8
avg = 8.0
max = 8

corr(u_i, X) = 0 (assumed)

Wald chi2(3) = 851.43
Prob > chi2 = 0.0000

lpe	Coefficient	Std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
lpsp	1.367685	.095608	14.31	0.000	1.180297	1.555073
TPT	.0047086	.006827	0.69	0.490	-.0086721	.0180893
KM	-.0732697	.0093048	-7.87	0.000	-.0915068	-.0550325
_cons	-26.34086	2.643252	-9.97	0.000	-31.52154	-21.16018
sigma_u	.33053373					
sigma_e	.07397073					
rho	.95230589	(fraction of variance due to u_i)				

Lampiran 3: Uji Panel Stata-17

Uji Chow

. xtreg lpe lpsp TPT KM, fe

Fixed-effects (within) regression

Number of obs = 184

Group variable: id

Number of groups = 23

R-squared:

Within = 0.8327

Between = 0.7664

Overall = 0.7694

Obs per group:

min = 8

avg = 8.0

max = 8

corr(u_i, Xb) = 0.1491

F(3,158) = 262.08

Prob > F = 0.0000

lpe	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]	
lpsp	1.324764	.1116614	11.86	0.000	1.104223	1.545306
TPT	.0004724	.0069604	0.07	0.946	-.0132751	.0142198
KM	-.075319	.0106157	-7.10	0.000	-.096286	-.0543519
_cons	-25.14876	3.092389	-8.13	0.000	-31.25652	-19.04101
sigma_u	.36686317					
sigma_e	.07397073					
rho	.96093346	(fraction of variance due to u_i)				

F test that all u_i=0: F(22, 158) = 146.89

Prob > F = 0.0000

Uji Hausman

	Coefficients			
	(b)	(B)	(b-B)	sqrt(diag(V_b-V_B))
	fe_model	re_model	Difference	Std. err.
lpsp	1.324764	1.367685	-.0429208	.0602848
TPT	.0004724	.0047086	-.0042362	.0017411
KM	-.075319	-.0732697	-.0020493	.0053747

b = Consistent under H0 and Ha; obtained from xtreg.

B = Inconsistent under Ha, efficient under H0; obtained from xtreg.

Test of H0: Difference in coefficients not systematic

chi2(3) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

= 7.25

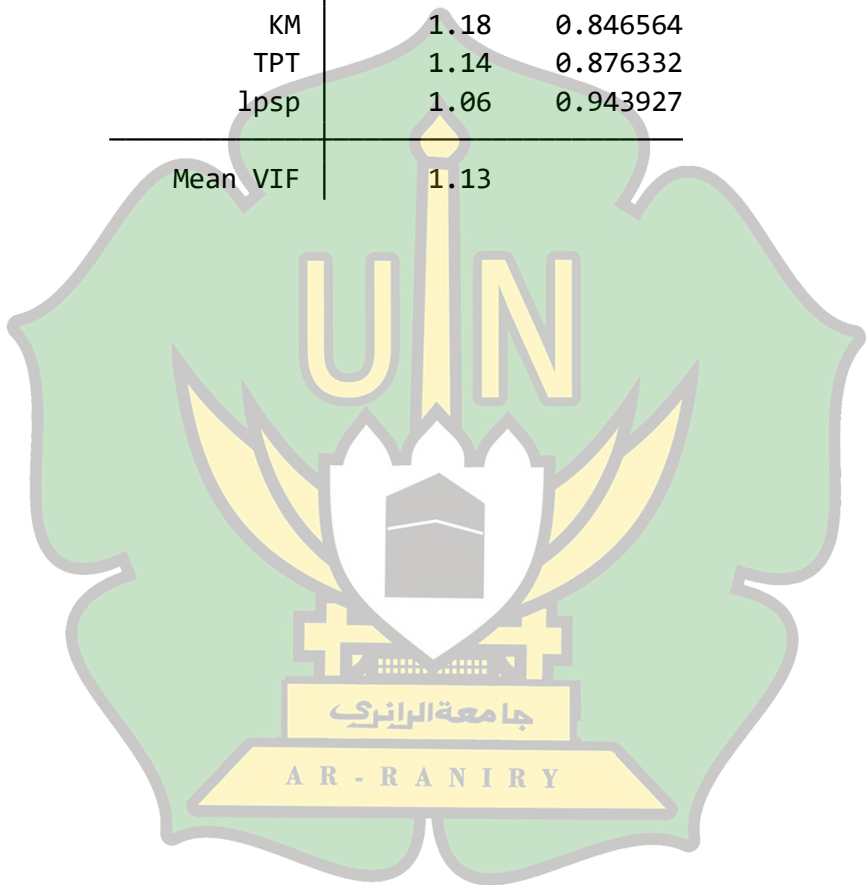
Prob > chi2 = 0.0643

Lampiran 4: Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinieritas

. vif

Variable	VIF	1/VIF
KM	1.18	0.846564
TPT	1.14	0.876332
lpsp	1.06	0.943927
Mean VIF	1.13	



DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, R., & Kusumo, H. (2018). Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Profit: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan*, 2(1), 62–85. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/profit>
- Adelia Suryani. (2023). Pengaruh Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 2(1), 48–56. <https://doi.org/10.55606/jurrih.v2i1.661>
- Ambarwati, A. D., Sara, I. M., & Aziz, I. S. A. (2021). Pengaruh Jumlah Uang Beredar (JUB), BI Rate dan Inflasi. *Warmadewa Economic Development Jurnal*, 4(1), 21–27.
- Ananda, I. A., Sukmawati, U. S., & Kidrian, E. (2021). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia(Ipm) Pada Kawasan Perbatasan Negara Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010-2019. *Cross-Border*, 4(2), 429–452.
- Apriska, L., Irwan, M., Suprpti, I. A. P., & Anggara, J. (2024).

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Kabupaten/Kota Di Provinsi NTB). *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 10(1), 1–11.
<https://doi.org/10.29303/jseh.v10i1.451>

Bahtiar, D., & Marlina, N. (2022). *Literasi dan Kajian Ilmiah INTISARI*. 1–3.

Februari, N., Ma, R., Abidin, Z., Salsabila, A., Mariana, D. E., Ekonomi, F., Uin, I., Ali, S., Tulungagung, R., Jalan, A., Sujadi, M., & No, T. (2024). *Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten / Kota Jawa Timur Tahun 2021 (IPM)*. *Penelitian Amelinda & Rachmawati (2022) dan Rinawati et al ., (2022) menyatakan*. 4(1).

Firmansyah, R., Ilman, A. H., & Cita, F. P. (2020). The Effect of Government Expenditure and the Economic Growth on the Human Development Index in Sumbawa Regency Period 2004-2017. *Nusantara Journal Of Economics*, 2(1), 53–62.
<https://repofeb.undip.ac.id/10177/>

Handoyo, R. D., Erlando, A., & Septiyanto, I. (2020). Dampak Faktor Eksternal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.24252/ecc.v7i1.13382>

Heise, A. (2009). Fiscal policy. *Elgar Encyclopedia of Post-Keynesian Economics*, 12, 181–183.

Ikhwan, M., Ekonomi, F., Universitas, E., Kuala, S., & Aceh, B. (2015). *Terhadap Pembangunan Pendidikan Di Aceh*. 9, 1–11.

Ilmiah, J., & Pendidikan, W. (2024). ? 1,2,3,4. 10(20), 292–304.

Imilda, Sufyan, & Hajriyanti, R. (2022). Pertumbuhan dan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi (Studi Kasus: Provinsi Aceh). *Jurnal EMT KITA*, 6(2), 221–226. <https://doi.org/10.35870/emt.v6i2.614>

Jummiati, J., Usman, U., Sari, C.P. M., & Rahmah, M. (2023). Jurnal Aplikasi Ilmu Ekonomi. *Jurnal Aplikasi Ilmu Ekonomi*, 2(2), 110–116. <https://doi.org/10.29103/jaie.v1i2.10323>

Kusumawati, A., Primandhana, W. P., & Wahed, M. (2021). Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Dan Indeks Pembangunan Manusia

terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 12(2), 118.
<https://doi.org/10.33087/eksis.v12i2.253>

- Maharani, C., Ningrum, D. A., Fatmawati, A. E., & Fadilla, A. (2024). Dampak Kemiskinan terhadap Kualitas Pendidikan Anak di Indonesia: Rekomendasi Kebijakan yang Efektif. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(3), 1–10. <https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i3.199>
- Martha, C. (2022). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Bidang Subsidi, Pendidikan, dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan The Effect of Government Expenditures in The Field of Subsidies, Education and Healthon Povert. *Jurnal Budget*, 7(1), 165–180.
- Miar, Zakiah, W., Giovanni, J., & T, S. C. (2024). Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Investasi, dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Tengah. *Cendekia: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 18(1), 72–88.

Nasution, D. P., Daulay, M. T., Handani, E., Pembangunan, U., &

- Budi, P. (2021). *PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR*. 14(1), 33–49.
- Pasha, D. A. (2024). Efek Pengangguran dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Indonesia. *Karimah Tauhid*, 3(1), 690–693. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i1.9266>
- Purwanti, S. D., & Rahmawati, F. (2021). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Indonesia. *Ecoplan*, 4(1), 32–44. <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v4i1.231>
- Putri, M. D., & Aimon, H. (2024). Analisis Pengeluaran Pemerintah Dan Likuiditas Perekonomian. *Media Riset Ekonomi Pembangunan (MedREP)*, Volume 1, 663–670.
- Suparno, H. (2015). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan Dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Peningkatan Pembangunan Manusia Di Provinsi Kalimantan Timur. *Journal of Innovation in Business and Economics*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.22219/jibe.vol5.no1.1-22>
- Wahyulianti, K., Septiani, E. D., Haryanti, Y., Setianingrum, R., &

Farliana, N. (2025). Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Gender Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Jawa Tengah Tahun 2019 - 2022. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 10(1), 75–86. <https://doi.org/10.29407/jae.v10i1.25030>

